# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1. 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Bontoharu tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontoharu didasarkan pada kondisi yang diinginkaan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

## 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

* 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 005-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambarahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor

5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

* 1. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113 )
  2. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor )

## 1. 3. Maksud dan Tujuan

* + 1. Maksud

Rencana strategis (Restra) Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

* + - 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
      2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
    1. Tujuan
       1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
       2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
       3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
       4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
       5. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;
       6. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontoharu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
       7. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
       8. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
       9. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
       10. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

## 4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOHARU

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi ) Kecamatan Bontoharu dalam penyenlenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Pernagkat Daerah dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontoharu periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Bontoharu ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU

Dalam bab ini dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontoharu 2021 – 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaan RTRW dan KHLS

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontoharu Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumasan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontoharu dalam 5 tahun mendatang.

Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bontoharu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontoharu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi BUpati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah

# BAB II

**GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOHARU**

## Fungsi Kecamatan

* 1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
  3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
  4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
  6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
  8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

1. **1 Tugas , Fungsi dan tuktur Organisasi Kecamatan Bontoharu**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,Kecamatan Bontoharu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontoharu :

* **CAMAT**

1. Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:
3. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
4. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
6. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
9. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
10. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
11. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
12. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
13. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
15. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
17. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
18. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
19. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
20. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
21. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
22. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
23. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
24. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
25. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
26. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
27. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Sekretaris**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
3. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;
4. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
5. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
6. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
9. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
10. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
11. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
12. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
13. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
15. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
16. mengelola administrasi umum;
17. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
18. mengelola administrasi keuangan;
19. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
20. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
23. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Subbagian Program dan Keuangan**

1. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
9. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
10. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
11. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
12. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
13. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
14. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
15. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
16. menyusun neraca keuangan kecamatan;
17. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
18. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
19. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
20. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
21. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
22. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
23. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
24. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum**

1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
9. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
10. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
11. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
12. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
13. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
14. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
15. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
18. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
9. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
11. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
12. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
13. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
16. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
9. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
10. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
11. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
13. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
14. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
15. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
16. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
17. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
18. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
20. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**-Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
10. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
12. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
13. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
14. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
15. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
16. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
17. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
18. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
19. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
20. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
21. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
22. mengumpulkan dan mengelolah data di bidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
23. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
24. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
25. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
26. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
27. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Seksi Kesejahteraan Sosial**

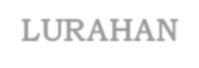
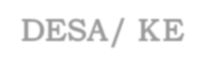
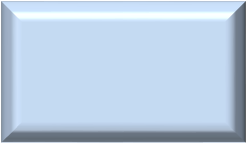
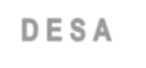
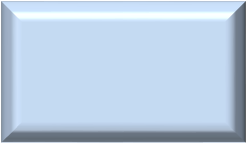
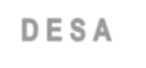
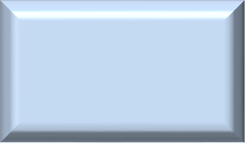
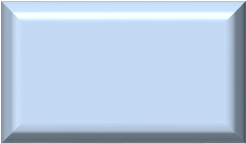
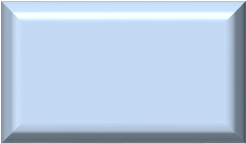
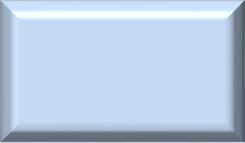
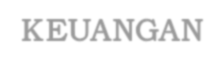
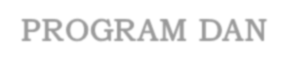
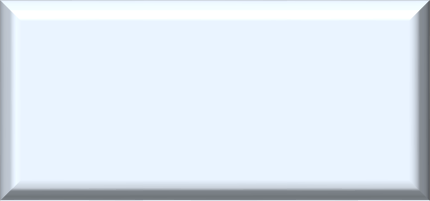
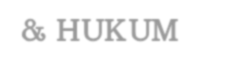
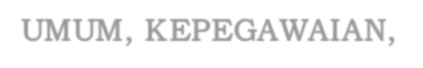
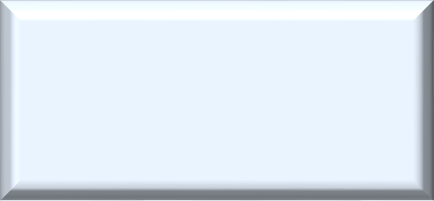
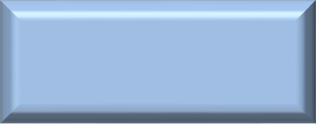
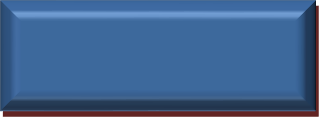
1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
10. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
11. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
12. mengoordinasikan  pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
13. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
16. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
10. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
11. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
12. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
15. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**-**

## Struktur Organisasi Kecamatan Bontoharu



Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bontoharu sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

## .2. 2. Sumber Daya Kecamatan Bontoharu

Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pend idikan, secara terperinci sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
| 1 | S2 | 0 | 0 |
| 2 | S2 | 9 | 60 |
| 3 | Diploma | 1 | 6,7 |
| 4 | SLTA | 5 | 33,3 |
|  | Jumlah | 15 | 100 |

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Gol.Ruang | S2 | S1 | Diploma | SLTA | Jumlah |
| 1 | IV/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IV/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IV/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | III/d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | III/c | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | III/b | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | III/a | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | II/d | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | II/c | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | II/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Jumlah | 0 | 9 | 1 | 5 | 15 |

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontoharu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontoharu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis barang/NAMA BARANG | MERK/TYPE | TAHUN PEMBELI AN | ASAL USUL | KONDI SI RUSAK BERAT | Harga (ribuan Rp) | KETERANGAN |  |
| 1 | Tanah |  |  | Pembelian |  |  |  |
| 2 |  | Avansa/Toyota / | 2009 | Pembelian |  | 159.000,00 | CAMAT |
| - | BONTOHARU |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha MIO S / | 2018 | Pembelian |  | 12.900,00 |  |
| B3B A/T | SEKCAM |
| 4 | Sepeda Motor | Suzuki Shogun | 1998 | Pembelian |  | 14.860,00 |  |
| R / - | STAF EKBANG |
|  |  | Suzuki Shogun |  |  |  |  |  |
| 5 | Sepeda Motor | (F1.125 Rcd R) / | 2008 | Pembelian | 14.660,00 | KASI |
|  |  | - |  |  |  | PERENCANAAN |
| 6 | Sepeda Motor | Susuki shogun | 2009 | Pembelian |  | 15.336,00 |  |
| NR / - | KASI TRANTIB |
| 7 | Sepeda Motor | Yamaha/Jupiter | 2010 | Pembelian |  | 15.200,00 | STAF UMUM |
| / - | KEPEG |
|  |  |  |  |  |  |  | KASI |
| 8 | Sepeda Motor | suzuki / UW 125  SC | 2015 | Pembelian | 20.000,00 | PEMBERDAYAA  N |
|  |  |  |  |  |  | MASYARAKAT |
| 9 | Multburst Generator | Moestro / MT | 2019 | Pembelian |  | 7.900,00 |  |
| Unit | 7000 CE |
| 10 | Mesin Ketik Manual | brother / - | 2009 | Pembelian |  | 2.000,00 |  |
| Standar (14-16) |
| 11 | Lemari Besi | Q-Biz / - | 2008 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 12 | Lemari Besi | Brother / - | 2012 | Pembelian |  | 1.400,00 |  |
| 13 | Lemari Besi | Q-Biz / - | 2008 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 14 | Lemari Besi | - / - | 2009 | Pembelian |  | 2.208,00 |  |
| 15 | Lemari Besi | brother / - | 2009 | Pembelian |  | 552,00 |  |
| 16 | Rak Kayu | - / - | 2000 | Pembelian |  | 520,00 |  |
| 17 | Filling Besi/Metal | Brother / - | 2011 | Pembelian |  | 1.400,00 |  |
| 18 | Lemari Kaca | - / - | 2002 | Pembelian |  | 800,00 |  |
| 19 | Lemari Kaca | - / - | 2003 | Pembelian |  | 800,00 |  |
| 20 | Lemari Makan | Mahkota Mas / - | 2012 | Pembelian |  | 550,00 |  |
| 21 | Lemari kayu | - / - | 2014 | Pembelian |  | 1.000,00 |  |
| 22 | Mesin Absensi | - | 2018 | Pembelian |  | 10.000,00 |  |
| 23 | Meja Kayu/Rotan | Activ | 2018 | Pembelian |  | 2.600,00 |  |
| 24 | Meja Rapat | - / - | 2008 | Pembelian |  | 2.550,00 |  |
| 25 | Meja Rapat | Topix / - | 2014 | Pembelian |  | 4.000,00 |  |
| 26 | Kursi Rapat | futura / - | 2009 | Pembelian |  | 312,50 |  |
| 27 | Kursi Rapat | futura / - | 2009 | Pembelian |  | 24.687,50 |  |
| 28 | Kursi Rapat | Futura | 2019 | Pembelian |  | 21.500,00 |  |
| 29 | Kursi Tamu | Bigtop 321 / - | 2000 | Pembelian |  | 300,00 |  |
| 30 | Kursi Tamu | - / - | 2003 | Pembelian |  | 520,00 |  |
| 31 | Kursi Tamu | Bigtop 321 | 2000 | Pembelian |  | 300,00 |  |
| 32 | Kursi Tamu | Bigtop 321 / - | 2000 | Pembelian |  | 300,00 |  |
| 33 | Kursi Tamu | - | 2003 | Pembelian |  | 520,00 |  |
| 34 | Kursi Tamu | - / - | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00 |  |
| 35 | Kursi Putar | Isabel / - | 2002 | Pembelian |  | 1.120,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Kursi Putar | Verona / - | 2002 | Pembelian |  | 780,00 |  |
| 37 | Kursi Putar | Indachi D-620 / - | 2009 | Pembelian |  | 800,00 |  |
| 38 | Kursi Putar | Brother | 2018 | Pembelian |  | 7.000,00 |  |
| 39 | Tenda | - / - | 2009 | Pembelian |  | 25.000,00 |  |
| 40 | Meja Biro | - / - | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00 |  |
| 41 | Meja Biro | Arinda / - | 2002 | Pembelian |  | 780,00 |  |
| 42 | Meja Biro | - / - | 2003 | Pembelian |  | 1.040,00 |  |
| 43 | Kursi Kerja | chitose / - | 2009 | Pembelian |  | 3.150,00 |  |
| 44 | Mesin Potong Rumput | matari / - | 2011 | Pembelian |  | 1.000,00 |  |
| 45 | Lemari Es | Sanyo / - | 2014 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 46 | AC Unit | LG SD9LS-1 / - | 2009 | Pembelian |  | 8.000,00 |  |
| 47 | AC Unit | Sharp | 2019 | Pembelian |  | 22.500,00 |  |
| 48 | Alat Pendingin Lain- lain | Daikin / FVRN71BXV14 | 2019 | Pembelian |  | 25.000,00 |  |
| 49 | Alat Pendingin Lain- lain | Daikin / FVRN71BXV14 | 2019 | Pembelian |  | 25.000,00 |  |
| 50 | Rak Piring | - | 2018 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 51 | Televisi | LG / - | 2014 | Pembelian |  | 4.000,00 |  |
| 52 | Televisi | LG 22 MT47AC / 22 MT47AC-PT | 2015 | Pembelian |  | 2.500,00 |  |
| 53 | Tangga Alumunium | - | 2018 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 54 | Mimbar/Podium | - / - | 2003 | Pembelian |  | 500,00 |  |
| 55 | Mimbar/Podium | - / - | 2009 | Pembelian |  | 1.000,00 |  |
| 56 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - / - | 2000 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 57 | P.C Unit/ | Benq / - | 2011 | Pembelian |  | 4.900,00 |  |
| 58 | P.C Unit/ | LG / - | 2014 | Pembelian |  | 6.000,00 |  |
| 59 | Lap Top | acer aspire 4730 Z / - | 2009 | Pembelian |  | 10.000,00 |  |
| 60 | Lap Top | sony valo / - | 2012 | Pembelian |  | 10.000,00 |  |
| 61 | Lap Top | Lenopo / - | 2014 | Pembelian |  | 12.000,00 |  |
| 62 | Lap Top | Toshiba /  Satelitte P 55 W- C | 2016 | Pembelian |  | 14.000,00 |  |
| 63 | Lap Top | Asus / X 453 s | 2016 | Pembelian |  | 5.000,00 |  |
| 64 | Lap Top | Lenovo Ideapad 110-14 IBR | 2017 | Pembelian |  | 5.000,00 |  |
| 65 | Lap Top | Lenovo Ideapad 110-14 IBR | 2017 | Pembelian |  | 5.000,00 |  |
| 66 | Lap Top | HP / Hp | 2018 | Pembelian |  | 7.500,00 |  |
| 67 | Lap Top | HP | 2018 | Pembelian |  | 7.500,00 |  |
| 68 | Lap Top | Aser Aspira /  Z476 | 2019 | Pembelian |  | 7.500,00 |  |
| 69 | Lap Top | Aser Aspira /  Z476 | 2019 | Pembelian |  | 7.500,00 |  |
| 70 | Note Book | Accer Aspire 1 /  - | 2011 | Pembelian |  | 4.000,00 |  |
| 71 | Note Book | - / - | 2010 | Pembelian |  | 4.000,00 |  |
| 72 | Printer | Canon Pixma / MP287 | 2016 | Pembelian |  | 1.000,00 |  |
| 73 | Printer | Caon Pixma | 2017 | Pembelian |  | 4.580,00 |  |
| 74 | Printer | Epson L 360 | 2018 | Pembelian |  | 3.000,00 |  |
| 75 | Printer | Canon Pixma / MP 287 | 2019 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Printer | Canon Pixma / | 2019 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |  |
| MP287 |
| 77 | Printer | Epson LX-300+ / | 2007 | Pembelian |  | 1.440,00 |  |
| - |
| 78 | Printer | Epson Lx-300 / - | 2000 | Pembelian |  | 800,00 |  |
| 79 | Printer | Canon / MP 237 | 2014 | Pembelian |  | 900,00 |  |
| 80 | Printer | Canon Mp287 | 2018 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 81 | Printer | Canon Mp 287 | 2018 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 82 | Printer | Cano Hp 267 | 2018 | Pembelian |  | 1.500,00 |  |
| 83 | Meja Kerja Pejabat | Olimpic | 2018 | Pembelian |  | 6.000,00 |  |
| Eselon IV |
| 84 | Meja Kerja | martim MT-301 / | 2009 | Pembelian |  | 1.250,00 |  |
| - |
| 85 | Meja Kerja | martim MT-201 / | 2009 | Pembelian |  | 6.075,00 |  |
| - |
| 86 | Meja Kerja | martim MT-201 / | 2009 | Pembelian |  | 675,00 |  |
| - |
| 87 | Meja Kerja | ACTIV / - | 2015 | Pembelian |  | 2.150,00 |  |
|  | Meja Tamu |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ruangan Tunggu | Bigtop 321 | 2000 | Pembelian | 300,00 |
|  | Pejabat Eselon III |  |  |  |  |
|  | Meja Tamu |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ruangan Tunggu | - | 2003 | Pembelian | 520,00 |
|  | Pejabat Eselon III |  |  |  |  |
|  | Meja Tamu |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Ruangan Tunggu | Lokal | 2019 | Pembelian | 1.100,00 |
|  | Pejabat Eselon III |  |  |  |  |
| 91 | Kursi Kerja Pejabat | Indachi | 2019 | Pembelian |  | 2.000,00 |  |
| Eselon III |
| 92 | Lemari Buku untuk | Olympic / - | 2002 | Pembelian |  | 480,00 |  |
| Perpustakaan |
| 93 | Lemari Arsip untuk | Martin AT-01 / - | 2009 | Pembelian |  | 1.600,00 |  |
| arsip Dinamis |
| 94 | Proyektor + | Infocus / - | 2014 | Pembelian |  | 5.500,00 |  |
| Attachment |
| 95 | Equalizer | dbx / - | 2013 | Pembelian |  | 4.300,00 |  |
| 96 | Microphone/Wireles | Spring / - | 2013 | Pembelian |  | 7.500,00 |  |
| s Mic |
| 97 | Peralatan studio | dbx / - | 2013 | Pembelian |  | 4.550,00 |  |
| Visual Lain-lain |
| 98 | Peralatan studio | Yamaha PSR | 2009 | Pembelian |  | 15.000,00 |  |
| Visual Lain-lain | 700 / - |
| 99 | Peralatan studio | - / - | 2013 | Pembelian |  | 3.300,00 |  |
| Visual Lain-lain |
| 100 | Stand Microphone | AMS002NC / - | 2013 | Pembelian |  | 1.100,00 |  |
| 101 | Camera Electronic | kodak easy | 2007 | Pembelian |  | 2.000,00 |  |
| share m753 / - |
| 102 | Mixer PVC | Yamaha / - | 2013 | Pembelian |  | 6.800,00 |  |
| 103 | Loudspeaker | Golden Sound / | 2013 | Pembelian |  | 10.250,00 |  |
| - |
| 104 | Loudspeaker | golden sound / - | 2013 | Pembelian |  | 7.200,00 |  |
| 105 | Loudspeaker | Hartke / - | 2009 | Pembelian |  | 4.900,00 |  |
| 106 | Wireless Amplifier | Kazt.9.02 / - | 2008 | Pembelian |  | 1.600,00 |  |
| 107 | Bangunan Gedung |  | 31/12/200 | Pembelian |  | 76.500,00 | kantor camat |
| Kantor Permanen | 6 | lama (mesium) |
| 108 | Bangunan Gedung |  |  | Pembelian |  | 826.770,59 | kantor camat |
| Kantor Permanen | bontoharu |
| 109 | Bangunan Gedung Kantor Permanen |  | 16/12/201  3 | Pembelian |  | 191.446,61 | Penimbunan Halaman Kantor  Camat |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Bangunan Gedung Kantor Permanen |  |  | Pembelian |  | 0,00 | Kantor Camat |
| 111 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain |  |  | Pembelian |  | 172.858,61 | paving blok  kantor camat bontoharu |
| 112 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen |  |  | Pembelian |  | 212.485,55 | aula kantor camat |
| 113 | Konstruksi Pagar |  |  | Pembelian |  | 220.244,25 | Pagar Depan  Kantor |
| 114 | Rumah Negara Golongan III Lain-  lain |  |  | Pembelian |  | 102.500,00 | Rumah dinas Camat |
| JUMLAH | | | | | | 2.507.001,60 |  |
| 1 | Sepeda Motor | Suzuki TRX | 1998 | Pembelian | Rusak Berat | 3.600,00 | Fisik masi ada/di bagian aset |
| 2 | Loudspeaker | Audio Blast AU 900 w / - | 2001 | Pembelian | Rusak Berat | 240,00 | Fisik Ada |
| 3 | Mesin Ketik Lain- Lain | Olypia / - | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 400,00 | Fisik Ada |
| 4 | PC Unit/ Komputer PC | Giga Pro / - | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 8.160,00 | Fisik Ada |
| 5 | Meja Biro | Olympic /- | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00 | Fisik Tidak ada |
| 6 | P.C Unit / Komputer PC | HP. Compaq / - | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 6.400,00 | Fisik Tidak ada |
| 7 | P.C Unit / Komputer PC | Samsung / - | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 6.400,00 | Fisik Tidak ada |
| 8 | Sepeda Motor | Suzuki Thunder/- | 2007 | Pembelian | Rusak Berat | 14.360,00 | Fisik masi ada di kec Bontoharu |
| 9 | Printer | HP. Deskjet F380 | 2008 | Pembelian | Rusak Berat | 1.200,00 | Fisik Tidak ada |
| 10 | P.C Unit/ Komputer PC | Beyond / - | 2009 | Pembelian | Rusak Berat | 9.000,00 | Fisik Ada |
| 11 | Printer | Cannon /- | 2009 | Pembelian | Rusak Berat | 1.200,00 | Fisik Ada |
| 12 | Peralatan komputer main frame lain-lain | HP. Deskjet D1660 | 2010 | Pembelian | Rusak Berat | 500,00 |  |
| 13 | Meja Biro | Olypic /- | 1003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00 | Fisik Tidak ada |
| 14 | Kursi Putar | Isabel | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 480,00 | Fisik Tidak ada |
| 15 | Kursi Rapat |  | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 160,00 | Fisik Tidak ada |
| 16 | Kursi Rapat |  | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 320,00 | Fisik Tidak ada |
| 17 | Kursi Rapat | Paragon /- | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 35,00 | Fisik Tidak ada |
| 18 | Kursi Rapat | Edenia / - | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 32,00 | Fisik Tidak ada |
| 19 | Kursi Tamu |  | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 1.800,00 | Fisik Tidak ada |
| 20 | Meja Biro | Olypic /- | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00 | Fisik Tidak ada |
| 21 | Kaca Riben |  | 2002 | Pembelian | Rusak Berat | 128,00 | Fisik Tidak ada |
| 22 | Televisi | Akira 14,matrix | 2008 | Pembelian | Rusak Berat | 2.500,00 | Fisik Tidak ada |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Laptop | Tosiba Satelite | 2007 | Pembelian | Rusak Berat | 10.000,00 | Fisik Ada |
| 24 | Personal Komputer Lain-lain | Kenika 500 V/- | 2003 | Pembelian | Rusak Berat | 300,00 | Fisik Tidak ada |
| 25 | Stan microphone | BMA {Bear Moutain | 2011 | Pembelian | Rusak Berat | 700,00 | Fisik Ada |
| 26 | Microphone | Audio Blast AU 900 | 2001 | Pembelian | Rusak Berat | 160,00 | Fisik Ada |
| 27 | Radio HF /FM lai- lain | Polytron | 2008 | Pembelian | Rusak Berat | 800,00 | Fisik Tidak ada |
| 28 | Radio HF /FM lai- lain | Sanken 1200 watt | 2001 | Pembelian | Rusak Berat | 800,00 | Fisik Ada |
| JUMLAH | | | | | | 70.575,00 |  |

Tabel 2.3. Tabel Data asset

## 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontoharu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bontoharu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontoharu ini mengacu pada hasil kerja .

44

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu Tahun 2016-2021 (TC.23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD** | **Target NSPK** | **Target IKK** | **Target Indikator lainnya** | **Terget Renstra SKPD Tahun ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian Pada tahun ke-** | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah  dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah tertib administrasi |  | Jumlah yang melaksanakan  tertib administrasi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100  % | 100% |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (   profil kecamatan dan tipologi) |  | Keberadaan Profil Kecamatan |  | 1  dok | 1  dok | 1  dok | 1  dok | 1  dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa   terbaik) |  | Pembinaan Desa |  | 1  keg | 1  keg | 1  keg | 1  keg | 1  keg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun |  | Keberadaan SOP bidang  Pemerintahan |  | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % |
| **2** | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan  system manajemen kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan |  | Keberadaan SOP bidang Administrasi |  | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis   jabatan tersusun |  | Dokumen Tupoksi, ABK,  Anjab |  | 3  dok | 3  dok | 3  dok | 3  dok | 3  dok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 30% |
|  | * Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun |  | Peingkatan Kedisiplinan PNS |  | 90  % | 80  % | 90  % | 95  % | 95  % | 80  % | 80  % | 80  % | 85  % | 85  % | 88.89  % | 100  % | 88.89  % | 89.47  % | 89.47  % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan  umum terdapat masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP |  | Identitas kependudukan |  | 90  % | 91  % | 92  % | 93  % | 94  % | 90  % | 90  % | 90  % | 90  % | 90  % | 100  % | 98.90  % | 97.83  % | 96.77  % | 95.74  % |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang   tersusun |  | Keberadaan SOP bidang Pelayanan |  | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % |
| **4** | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan  masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU   dan PKK |  | Pembinaan kader  Posyandu |  | 2  keg | 2  keg | 2  keg | 2  keg | 2  keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100  % | 100  % | 100  % | 100% | 100% |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS |  | Sekolah yang ada UKS |  | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik   agama |  | Toleransi antar  umat beragama |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100% |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang   berfasilitas mendapat bantuan |  | Bantuan rumah ibadah |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100% |
| **5** | Meniingkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan,  koperasi, dan BKM binaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif |  | Pembinaan UKM |  | 3  unit | -3  unit | -3  unit | 1  unit | 3  unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100  % | 66.67  % |
|  | * Jumlah Koperasi aktif |  | Pembinaan  Koperasi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun |  | Keberadaan SOP Ekbang |  | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | * Jumlah program kemitraan   yang terjalin |  | Pembinaan  kemitraan UKM |  | 1  prog | 1  prog | 1  prog | 1  prog | 1  prog | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100  % | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam  kehidupan bermasyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 |  | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan |  | 20  % | 20  % | 10  % | 10  % | 10  % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100% |
|  | * % penurunan illegal logging |  | Pencegahan Illegal  Loging |  | 80  % | 85  % | 90  % | 90  % | 90  % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100% |
|  | * % penurunan illegal fishing |  | Pencegahan Illegal Fishing |  | 30  % | 30  % | 20  % | 20  % | 20  % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 66.67  % | 66.67  % | 50 % | 50 % | 50% |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang   tersusun |  | Keberadaan SOP Trantibun |  | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1  SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100  % | 100  % | 100  % | 100  % | 100% |

Laporan keuangan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontoharu tahu 2016-2021 (TC.24)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran Tahun ke- (000)** | | | | | **Realisasi Anggaran Tahun ke- (000)** | | | | | **Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)** | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan**  **(%)** | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Daerah | 13.330.  200.000 | 11.905.  200.000 | 11.358.  680.000 | 9.575.9  49.119 | 2.949.94  9.295 | 12.061.  742.036 | 10.966.  509.309 | 10.783.  696.474 | 9.384.89  5.732 | 2.752.9  87.109 | 90.5% | 92% | 94.9% | 98% | 93.3% | 468.7 % | 93.74 % |
| 1. Belanja Tidak Langsung | 12.780.  200.000 | 11.105.  200.000 | 10.675.  200.000 | 8.857.8  78.519 | 2,502.80  0.000 | 11.353.  348.236 | 10.170.  041.263 | 10.181.  279.290 | 8.674.50  5.093 | 2.311.1  34.302 | 88.8% | 91.6% | 95.4% | 97.9% | 92.3% | 466 % | 93.2 % |
| a. Belanja  Pegawai | 12.780.  200.000 | 11.105.  200.000 | 10.675.  200.000 | 8.857.8  78.519 | 2,502..  800.000 | 11.353.  348.236 | 10.170.  041.263 | 10.181.  279.290 | 8.674.50  5.093 | 2.311.1  34.302 | 88.8% | 91.6% | 95.4% | 97.9% | 92.3% | 466 % | 93,2 % |
| b. Belanja Hibah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Belanja  Langsung | 550.000.  000 | 800.000.  00 | 683.480.  000 | 716.070.  600 | 447,149.  295 | 546.393.  800 | 796.468.  046 | 602.417.  148 | 716.070.  600 | 441.852.  807 | 99.3% | 99.4% | 88% | 100% | 98.8% | 485.5 % | 97.1 % |
| a. Belanja  Pegawai | 139.470.  000 | 320.105.  000 | 150.000.  000 | 100.400.  000 | 80.100.  000 | 139.470.  000 | 320,105,  000 | 77.100.  000 | 100.400.  000 | 80.100.  000 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 500 % | 100 % |
| b. Belanja  barang dan Jasa | 382.730.  000 | 464.895.  000 | 60.640.  000 | 492.670.  600 | 367.042.  295 | 379.123.  800 | 461.783.  046 | 60.445.  000 | 486.990.  639 | 361.752.  807 | 99 % | 99.1% | 99.7% | 98.8% | 98.6% | 495.2 % | 99.04% |
| c. Belanja  Modal | 27.800.  000 | 15.000.  000 | 20.000.  000 | 123.000.  000 | - | 27.800.  000 | 14.580.  000 | 20.000.  000 | 123.000.  000 | - | 100 % | 97,2 % | 100 % | 100 % | - | 397.2 | 79.44 % |

## 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

* 1. **- Analisis Renstra**

Analisis terhadap :

* + - Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan.
    - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
    - Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032.
    - KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services).

Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya.Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);
4. Jasa pendukung (supporting).

## Tantangan dan Peluang

**- Tantangan**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontoharu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

Insfra struktur Kelistrikan Yang Belum merata di semua Desa/Kel Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontoharu sudah dilakukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum ada 3 Desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik 24 jam karena daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat eletrivikasi di Kecamatan Bontoharu masih rendah dari jumlah rumah tangggah yang ada.

**Pengguna Listrik Bukan Pengguna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLN** | | | **Non PLN Jumlah Listrik** | | |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Kel Putabangun | 350 | 144 | - | 494 |

438

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Kel Bontobangun | | 266 | 172 | - |
| 3. | Desa Bontosunggu | 396 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 396 |
| 4. Desa Bontoborusu | - | 359 | - | 359 |
| 5. Desa Kahu-kahu | - | 413 | - | 413 |
| 6. Desa Bontolebang | - | 217 | - | 217 |
| 7. Desa Bontotangnga | 330 | - | - | 330 |
| 8. Desa Kalepadang | 354 | - | - | 354 |
| **Bontoharu** | **1.696** | **1,305** | **-** | 3.001 |

* Data BPS Bontoharu Dalam Angkat 2020

1. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah

kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan saran transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Bontoharu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

1. Oleh karena itu, dalam rnagka meningkatnkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Bontoharu. Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem,Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontoharu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontoharu secara umum.

Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontoharu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontoharu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

1. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan

tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitasi ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh ti gkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

1. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas meyebabkan potensi perikanan

dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Bontoharu.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

1. Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

- **Peluang**

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Bontoharu :

1. Peluang pengembangan pembangunan dari Renstra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Bontoharu, khususnya pada sektor kemaritiman.
2. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Bontoharu mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
3. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
4. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfatatkan secara optimal.
5. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

# BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOHARU**

## 3.1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontoharu

Kecamatan Bontoharu pada awal pemerintahannya merupakan Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, yang membawahi 5 (lima) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa, yaitu Kelurahan Benteng, Benteng Selatan, Benteng Utara, Putabangun, Bontobangun, Desa Bontoborusu, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar, yaitu Kecamatan Bontoharu yang masih membawahi beberapa Desa, maka pemerintah Kabupaten Selayar membagi Wilayah Pemerintahan Kecamatan menjadi 2 (dua), yaitu Kecamatan Bontoharu yang berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun sebagai Ibukota Kecamatan Bontoharu meliputi (Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Bontoborusu,Desa Bontolebang, Desa Bontosunggu dan Desa Bontotangnga) ditambah 2 desa pemekaran, yaitu desa Kahu- Kahu dan Desa Kalepadang, sementara kecamatan Benteng yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten membawahi 3 (tiga) Kelurahan yaitu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan dan Kelurahan Benteng Utara.

Pembagian Wilayah tersebut di atas, dalam rangka mempercepat penataan perkotaan dan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Bontoharu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secapara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Masih Lemahnya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang kebijakan Pemerintah daerah | Pengoptimalan pelayanan publikkepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana | 1. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukanyang terlayani 2. Data kelengkapan monografi dan profil Kecamatan yang bersumber dari propil kelurahn/ desa yang   belum lengkap |
| 2 | Terbatasnya jumlah sarana dan prasaran yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal | Belum maksimalnya pemanfaatan tehnologi terhadap pelayanan | 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik  2 Sarana dan prasarana pelayanan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang belum ada dukungan fisik.   1. SDM staff yang belum terupdate 2. Jumlah staff yang tidak memadai |
| 3 | Belum optimalnya peran serta dan swadaya | Usulan masyarakatyang masuk  dalam APBD dan Musrenbang | 1. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat  dalam Musrenbang desa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | masyarakat dalam pemberdayaan dan Pembangunan Wilayah | Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama | dan kecamatan  2. Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas  anggaran kegiatan |
| 4 | Lambatnya Peranan dan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan | Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelompok yang rentan | 1. Masih rendahnyatingkat poskamling dan Linmas aktif 2. Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi   dan aktif di desa yang  masih rendah |

## 2. Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontoharu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

### “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

* + Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
  + Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari

birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

1. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

1. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Selanjutnya berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021- 2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

* 1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
  2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
  3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
  4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
   1. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
   2. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   3. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

1. Tersedianya lahan untuk kawasan.
2. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
3. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
4. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
5. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
6. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
   1. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
   2. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
   3. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
   4. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
   5. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
   6. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
   7. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

1. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
2. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
3. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
4. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
5. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
   1. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
   2. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   3. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
   4. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
   5. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa
6. Tersedianya lahan untuk kawasan.
7. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
8. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
9. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
10. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
11. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

### 3 Pilar :

***Kawasan Ekonoi Khusus Pariwisata Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kawasan Distribusi Barang dan Jasa***

### 1 Program Unggulan :

***GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri***

## 3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

**3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Kemantrian Dalam Negeri**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggaran dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstranya terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-

program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrafi birokratif daerah khususnya Kecamatan Bontoharu.

## 1.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

## .Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

* + 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

* + - 1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
      2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
      3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
      4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
      5. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
      6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
      7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
      8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
      9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
      10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
      11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
      12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau- pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
   1. Mengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
   2. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
   3. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   4. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
   5. Mengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
   6. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   7. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.
2. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
   1. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
   2. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
   3. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
   4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
3. Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
   1. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
   2. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
   3. Menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
4. Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
   1. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
   2. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
   3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
   4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
   5. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
5. Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
   1. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
   2. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
   3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
6. Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
   1. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
   2. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
   3. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
   4. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :
   1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
   2. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
   3. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
8. Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
   1. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
   2. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect)

terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan

* 1. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.

1. Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
   1. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
   2. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
   3. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
2. Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
   1. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
   2. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
   3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
   4. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

(11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :

1. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau- Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
8. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan kaeadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
9. Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
   1. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
   2. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   3. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis

Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;

* 1. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

## 1.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

* + 1. Analisis Lingkungan Internal
       1. Kekuatan
          - Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
          - Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelauatan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
          - Potensi pengembangan sektor pariwisata yang berada di Kecamatan Bontoharu
       2. Kelemahan
          - Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
          - Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
          - Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tinggkat kecamatan maupun desa yang berorintasi pada pengambangan potensi kelauatan juga potensi perkebunan dll.
          - Masih terbatasnya fasilitas kerja.
          - Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
          - Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.
    2. Analisis Lingkungan Eksternal
       1. Peluang
          - Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
          - Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
          - Potensi investasi yang relative besar dan prosfektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).
       2. Tantangan
          - Kondisi geografis Kecamatan Bontoharu yang wilyahnya yang terdiri atas beberapa pulau dan datarn rendah
          - Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Bontoharu yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
          - Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontoharu sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas
          - Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi

: kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

* + - * + Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
        + Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebututhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontoharu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan

Bontoharu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengna margin keuntungan yang juga relative kecil.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontoharu Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasiken dalam Renstra Kecamatan Bontoharu 2021- 2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

* + 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :
       1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
       2. Meningkatnya Nilai SAKIP

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :
   1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
   2. Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

1. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :
   1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
   2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontoharu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026

(PERUBAHAN 2023) KECAMATAN BONTOHARU



Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontoharu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada tahun | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  (M-1) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan  Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70.5% | 72.7% | 75.2% | 80.2% | 85.2% |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan | 60.2 | 65.2 | 70.2 | 75.2 | 80.0 |
| Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan aset  Daerah | Laporan Keuangan Kecamatan Bontoharu sesuai Standar Akuntansi  Pemerintahan | Sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai |
| 2. | Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan (M-2) | Meningkatnya Kualitas  Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkanya Kualitas  Pemerintahan Desa | % Urusan Pemerintahan Desa yang  Difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keaggamaan (M5) | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal  dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6950 | 0,7050 | 0,7150 | 0,7200 | O,7200 |
| Meningkatnya Fasilitas  Pelayanan Keagamaan | Angka Kriminalitas | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,20 | 6,25 |

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026

(PERUBAHAN 2023) KECAMATAN BONTOHARU

# Tabel 4.2 Tabel Perubahan Tujuan,Sasaran dan Indikator Renstra Kecamatan Bontoharu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuam / Sasaran** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | |  |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 1 | Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontoharu |  | Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Bontoharu | 55 | 64 | 68 | 73 | 76 |  |
|  | Meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan Kecamatan Bontoharu masyarakat | Nilai Sakip Kecamatan | 60 | 65 | 70 | 75 | 76 |  |
|  |  | Laporan Keuangan Kecamatan Bontoharu sesuai SAP | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai |  |
|  |  | IndeksKepuasan Mastyarakat Kecamatan Bontoharu | 70 % | 72,50 % | 75 % | 80 % | 85 % |  |
| 2 | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontoharu |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontoharu | 0,6300 | 0,6650 | 0,7000 | 0,7150 | 0,7300 |  |
|  | Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakatnya dan pemerintahan Desa | Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang dikoordinasikan | 63 % | 66 % | 70 % | 71 % | 73 % |  |
|  |  | Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026

(PERUBAHAN 2023) KECAMATAN BONTOHARU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kerifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontoharu |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Bontoharu | 0,6900 | 0,7000 | 0,7100 | 0,7150 | 0,7150 |  |
|  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 69 % | 70 % | 71 % | 71.5 % | 71.5 % |  |
| 4 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontoharu |  | Indeks Kesolehan Sosial Kecamatan Bontoharu | 63,00 | 65,15 | 67,30 | 70,00 | 75,00 |  |
|  | Meningkatnya toleransi Kehidupan Sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu | Tingkat Toleransi di Kecamatan | 63 % | 65 % | 67 % | 70 % | 75 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontoharu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontoharu mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yakni :

## *“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”*

1. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu yaitu Misi ke-1,2, dan 5 yakni;

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M1)
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M2)
3. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)

Dari Misi ke-1,2,dan 5 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bontoharu untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontoharu

Sasaran :a. Meningkatnya Nilai SAKIP

b. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamat Bontoharu

Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

b. Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontoharu.

Sasaran: Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan

Bontoharu

Sasaran : Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di

Kecamatan Bontoharu

## BAB V

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontoharu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontoharu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontoharu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu.

* 1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

* 1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

* + - 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontoharu yang lebih tepat & rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

1. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontoharu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI | | : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | |  |
| MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | | | | |
| **No.** | **Tujuan** | | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan | | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | 1. Menigkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat  Teknologi yang Baik. | 1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur |
| 2. Meningkatnya Nilai SAKIP | 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian  Hasil |
| 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-  Undangan yang Berlaku |
| VISI | | : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | |  |
| MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan | | | | | |
| **No.** | **Tujuan** | | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa | | 1. Mengkoordinasika n Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program  Gerbang Sari |
| 2. Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | 1. Mengoptimalka n Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangka n Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan | | 1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam  Gerbang Sari |
| VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia | | | | | |
| MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | | | | | |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 3 | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | 1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasi  kan pada kehidupan sosial | | 1. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia | 1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai- Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan   Pelayanan Keagamaan |
| 2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | |

Tabel 5.2. Perubahan Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISI** | | **: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia** | | |  |
| **MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan** | | | | | |
| **No.** | **Tujuan** | | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| **1** | Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Buki | | Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah | Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur |
| Meningkatnya Tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Meningkatkan SDM Aparatur, efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran | Peningkatan kulitas SDM aparatur melalui Diklat |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat | meningkatkan inovasi serta pemamfaatan teknologi dalam pelayanan; | Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan |
| **MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan** | | | | | |
| **2.** | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bobtoharu | | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Mengoptimalkan koordinasi stakeholder dalam rangka peningkatan fungsi kelembagaan dan produktifitas masyarakat perdesaan | Pelaksanaan bimbinagan tekhnis fungsi kelembagaan dalam peningkatan perekonomian desa |
|  |  | | Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan | Pelaksanaan sosialisasi untuk meninkatkan Kualitas SDM Kepala desa dan Perangkat Desa |
| **MISI 5 : Meningkatkan Pembiaan Kehidupan sosial dan keagamaan** | | | | | |
| **3.** | Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Buki | | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Meningkatkan wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya | Peninkatan wawasan kebangsaan Masyarakat melalui Pembinaan, Bimtek dan Sosialisasi |
| **4** | Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Buki | | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Buki | Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia | Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan; |

## BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontoharu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* + 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
     1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
     3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
     1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
     1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
     2. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
     3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
     4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
     6. Bimbingan tehnis implementasi Peraturan Perundang- undangan
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
     1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
     6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
     7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
     1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
     2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
     3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
     4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
     1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
     1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
     3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
     4. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* 1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
     1. Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
  2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
     1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
     2. Peningkatan Efektivitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
     1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-

kegiatan yaitu :

Kegiatan :

* 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

* + 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    4. Evaluasi Kelurahan
    5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan a Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
     1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
     2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  2. Koordinasi Penerapan dan penegakan perda dan perkada;
     1. Koordinasi sinergi Perangkat Daerah yang bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontoharu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

* 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
     1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
     2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
     3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
   1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
      1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      3. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang- undangan
      4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      6. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      7. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
      8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      9. Fasilitasi pelaksanaan Tugas,fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
      10. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
      11. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
      12. Fasilitasi penataan dan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
      13. Fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      14. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**TABEL 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar**

## Tahun 2021-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **o.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Nomenklatur urusan (program / kegiatan / sub kegiatn** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capai an Pada Awal Tahu n Peren canaa n** | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD**  **Penan g gung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 1** | | **Tahun 2** | | **Tahun 3** | | **Tahun 4** | | **Tahun 5** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **Tar- get** | **Rp. (000.000)** | **Tar**  **-**  **get** | **Rp. (000.000)** | **Tar- get** | **Rp. (000.000)** | **Tar**  **-**  **get** | **Rp. (000.000)** | **Tar**  **-**  **get** | **Rp. (000.000)** | **Tar- get** | **Rp. (000.000)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | Meningk atkan akuntabil itas kinerja pemerint ah daerah (T-1) | Meningk atnya kualitas pelayan an kepada masyara kat (S1) | x.xx.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**  **A** | | | **Persentase Peningkata n Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100** | **100** | **4.191.788.5**  **27** | **100** | **4.229.174**  **.112** | **100** | **4.335.030.339** | **100** | **4.439.027.71**  **8** | **100** | **4.544.942.**  **919** | **100** | **4.544.942.**  **919** | **Kecam atan Bontoh aru** | **Kecamat an Bontohar u** |
| x.xx.01. 2.01 | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah | | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan  Keuangan | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.01 |  | a | Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai juknis  (Renja,RKA, DPA.RKAP,D | 5 dok | 5 dok | 6.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  |  |  |  | | | PPA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renstra) |
|  |  | | Penyusun | Jumlah  dokumen perencanaan yang disusun sesuai  juknis (RKA dan DPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.01 | a | | Dokumen  Perencana an | 2 dok | 2 dok | 4.000.000 | 2  dok | 4.000.000 | 2 dok | 4.500.000 | 2  dok | 5.000.000 | 2  dok | 5.500.000 | 2 dok | 5.500.000 | Kel. LBB | Kel. LBB |
|  |  | | Perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Koordinasi  dan | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.02 | b | | Penyusun  an Dokumen | dokumen  RKA yang dikoordinasi | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | | RKA-  SKPD | kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Koordinasi | Jumlah dokumen RKA  perubahan yang dikoordinasi kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | dan |
|  |  | | Penyusun |
| x.xx.01.2. 01.03 | c | | an  Dokumen |
|  |  | | Perubahan |
|  |  | | RKA- |
|  |  | | SKPD |
|  |  | | Koordinasi | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.04 | d | | dan  Penyusun an DPA- | dokumen  DPA yang dikoordinasi | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | | SKPD | kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Koordinasi | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | dan | dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.05 | e | | Penyusun  an Perubahan | DPA  Perubahan  yang | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | | DPA- | dikoordinasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | SKPD | kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Koordinasi  dan Penyusun | Jumlah Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | an | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Laporan | Capaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 01.07 | f | | Capaian  Kinerja | Kinerja yang  disusun | 3 dok | 3 dok | 3.000.000 | 3  dok | 5.000.000 | 3 dok | 2.000.000 | 3  dok | 2.000.000 | 3  dok | 2.000.000 | 3 dok | 2.000.000 | Kec.  Bth | Kec. Bth |
|  |  | | dan | sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Ikhtisar | Juknis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Realisasi | (LAKIP, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Kinerja  SKPD | LPPD, LKPJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah evaluasi yang dilaksanaka  n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Administrasi | persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. |  | Keuangan | administrasi |
| 02. |  | Perangkat | keuangan |
|  | B | Daerah | yang tersedia |
| x.xx.01.2. 02.01 | Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah ASN  yang menerima gaji dan  Tunjangan | 30  orang | 30  orang | 2.470.676.3  77 | 30  oran g | 2.500.737  .133 | 30  orang | 2.510.790.482 | 30  oran g | 2.551.522.37  2 | 30  oran g | 2.584.817.  645 | 30  orang | 2.584.817.  645 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Penyediaa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 02.02 | Administra  si Pelaksana | | Kegiatan  Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 50.000.000 | 100  % | 50.001.25  0 | 100% | 52.519.990 | 100  % | 55.562.926 | 100  % | 57.529.900 | 100% | 57.529.90  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | an Tugas | | yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 02.02 | Administra  si Pelaksana | | Kegiatan  Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 130.365.87  5 | 100  % | 132.533.9  04 | 100% | 134.552.067 | 100  % | 136.499.672 | 100  % | 138.520.07  4 | 100% | 138.520.0  74 | Kel.LB B | Kel.LBB |
|  | an Tugas | | yang tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | | Jumlah verifikasi keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |
|  | Penatausa | |
| x.xx.01.2. | haan dan | |
| 02.03 | Pengujian/ | |
|  | Verifikasi | |
|  | Keuangan | |
|  | SKPD | |
|  | Koordinasi | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan | | rekon |
| x.xx.01.2. | Pelaksana | | akutansi |
| 02.04 | an | | yang |
|  | Akuntansi | | dikoordinasi |
|  | SKPD | | kan |
|  | Koordinasi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan  Penyusun | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 02.05 | an  Laporan Keuangan | | Laporan  Keuangan yang | 1 dok | 1 dok | 3.000.000 | 1  dok | 3.000.000 | 1 dok | 3.000.000 | 1  dok | 3.000.000 | 1  dok | 3.000.000 | 1 dok | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Akhir  Tahun | | disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKPD | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengelola | | Jumlah  Dokumen tanggapan pemeriksaan  yang di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 02.06 | an dan  Penyiapan Bahan | |
|  | Tanggapa | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n  Pemeriksa an | | kelolah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 02.07 | Koordinasi  dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan  /Semester an SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan di koordinasika n | 2  Lapor an | 2  Lapor an | 0 | 2  Lap ora n | 2.000.000 | 2  Lapor an | 2.000.000 | 2  Lap ora n | 3.000.000 | 2  Lap ora n | 3.000.000 | 2  Lapora n | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2. 02.08 | Penyusun  an Pelaporan dan Analisis Prognosis  Realisasi Anggaran | | Jumlah laporan prognosis realiasasi keuangan ya ng disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03 | C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase  Sarana dan prasarana aparatur yang  memadai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.01 | Penyusun  an Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah  SKPD | | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang disusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.02 | Pengaman  an Barang Milik Daerah  SKPD | | Jumlah kegiatan pengamanan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.03 | Koordinasi  dan Penilaian Barang Milik Daerah  SKPD | | Jumlah rekon BMD yang dikoordinasi kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.04 | Pembinaa  n, Pengawas an, dan Pengendal ian Barang Milik  Daerah | | Jumlah kegiatan Pengawasan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pada SKPD | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.05 | Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada  SKPD | | Jumlah Laporan Aset BMD | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | 1  dok | 3.000.000 | 1  dok | 3.000.000 | 1 dok | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2. 03.06 | Penatausa haan Barang Milik Daerah  pada SKPD | | Jumlah laporan inventaris BMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 03.07 | Pemanfaat an Barang Milik  Daerah SKPD | | Jumlah laporan pemanfaatan BMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05. | D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kelancaran Administrasi keuangan dan operasional  perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.01 | Peningkat an Sarana dan Prasarana  Disiplin Pegawai | | Jumlah Sarana dan Prasarana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.02 | Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut  Kelengkap annya | | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | 0 | 0 | 0 | 16  pas ang | 8.000.000 | 0 | 0 | 16  pas ang | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2. 05.03 | Pendataan dan Pengelola an Administra si Kepegawa  ian | | Jumlah pegawai yang didata dan di kelolah Administrasi kepegawaian  nya | 30  orang | 30  orang | 2.000.000 | 30  ora ng | 2.000.000 | 30  orang | 2.000.000 | 30  ora ng | 2.000.000 | 35  ora ng | 3.000.000 | 35  orang | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026

(PERUBAHAN 2023) KECAMATAN BONTOHARU



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.xx.01.2. 05.04 | Koordinasi dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegawa ian | Jumlah Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang di  koordinasika n | 2  sistem | 2  sistem | 0 | 2  sist em | 2.000.000 | 2  siste m | 2.000.000 | 2  sist em | 2.000.000 | 3  sist em | 4.000.000 | 3  sistem | 4.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2. 05.05 | Monitoring  , Evaluasi, dan Penilaian  Kinerja Pegawai | Jumlah pelaksanaan monev kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.06 | Pemulang an Pegawai  yang Pensiun | Jumlah pensiunan yang dipulangkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.07 | Pemulang an Pegawai yang Meninggal dalam Melaksana  kan Tugas | Jumlah pegawai yang gugur dalam tugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.08 | Pemindah an Tugas ASN | Jumlah pemindah-  tugasan ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.09 | Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas  dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tugas dan Fungsi | 3  orang | 0 | 0 | 3  ora ng | 15.000.00  0 | 3  orang | 15.000.000 | 3  ora ng | 15.000.000 | 3  ora ng | 20.000.000 | 3  orang | 20.000.00  0 | Prov. Sul Sel | Prov. Sul Sel |
| x.xx.01.2. 05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang  -  Undangan | Jumlah sosialisasi P eraturan perundang- undangan yang dilaksanaka  n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.11 | Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang  -  Undangan | Jumlah yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Sumber Daya  Aparatur yang diikuti | 2  orang | 4  orang | 20.000.000 | 2  ora ng | 10.000.00  0 | 2  orang | 10.000.000 | 2  ora ng | 10.000.000 | 3  ora ng | 15.000.000 | 3  orang | 15.000.00  0 | Prov. Sul Sel | Prov. Sul Sel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bimbingan | | Jumlah yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teknis | | mengikuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 05.11 | Implement  asi  Peraturan Perundang | | Bimtek  peningkatan  kapasitas Sumber Daya | 2  orang | 3  orang | 15.000.000 | 3  ora ng | 15.000.52  0 | 3  orang | 16.719.879 | 3  ora ng | 16.150.798 | 3  ora ng | 18.999.900 | 3  orang | 18.999.90  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | - | | Aparatur yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Undangan | | diikuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06. | E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pesentase  ketersediaan administrasi umum  perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | Jumlah Komponen  Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor AULA(Pemas angan Instalasi Listrik dan perlengkapan  nya) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 6.01 | Komponen  Instalasi  Listrik/Pen erangan | | 1 Unit | 1 Unit | 4.000.000 | 1  Uni t | 4.000.550 | 1  Paket | 919.879 | 1  Pa ket | 960.140 | 1  Pa ket | 989.900 | 1  Paket | 989.900 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Bangunan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kantor | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | peralatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.02 | Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor | | dan  perlengkapa n kantor yang disediakan (Kipas  angin,AC,La | 16  Unit | 16  Unit | 70.000.000 | 8  Uni t | 70.000.55  2 | 8 Unit | 78.519.879 | 8  Uni t | 80.350.950 | 10  Uni t | 84.989.984 | 10 Unit | 84.989.98  4 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  |  | | ptop,dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Printer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laptop,dan  Printer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.02 | Peralatan  dan | | 4 unit | 4 unit | 12.000.000 | 4  unit | 12.000.00  0 | 4 unit | 13.000.000 | 4  unit | 14.000.000 | 5  unit | 15.000.000 | 5 unit | 15.000.00  0 | Kel.  LBB | Kel.  LBB |
|  | Perlengka | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pan Kantor | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.03 | n  Peralatan Rumah | | Peralatan  rumah tangga yang |
|  | Tangga | | disediakan |
|  | Penyediaa | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. | n Bahan | | logistic |
| 06.04 | Logistik | | kantor yang |
|  | Kantor | | dipersiapkan |
| x.xx.01.2. 06.05 | Penyediaa n Barang  Cetakan | | Jumlah  barang cetakan dan | 3.320  lbr | 3325  lbr | 1.996.000 | 334  0  lbr | 2.000.000 | 3340  lbr | 2.000.000 | 335  0  lbr | 3.000.000 | 335  0  lbr | 3.000.000 | 3350  lbr | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dan | penggandaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penggand | n yang |
| aan | disediakan |
|  | Penyediaa | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.05 | n Barang  Cetakan  dan Penggand | barang  cetakan dan  penggandaan yang | 26.00  6 lbr | 26.00  6 lbr | 9.000.000 | 24.  004  lbr | 8.000.523 | 26.00  9 lbr | 9.358.768 | 30.  006  lbr | 11.150.990 | 40.  008  lbr | 13.989.900 | 40.008  lbr | 13.989.90  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | aan | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bacaan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | Perundang- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.06 | n Bahan  Bacaan dan Peraturan  Perundang | undangan  yang disediakan (Langganan  Koran dan | 2  bahan bacaa n | 2  bahan bacaa n | 4.020.000 | 2  bah an bac  aan | 5.000.000 | 2  bahan bacaa n | 5.000.000 | 2  bah an bac  aan | 5.000.000 | 2  bah an bac  aan | 5.000.000 | 2  bahan bacaa n | 5.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | -undangan | Pengadaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perundang- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | undanagan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bacaan dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | Perundang- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.06 | n Bahan  Bacaan dan Peraturan  Perundang | undangan  yang disediakan (Langganan  Koran dan | 2  bahan bacaa n | 2  bahan bacaa n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | -undangan | Pengadaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perundang- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | undangan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.07 | Penyediaa  n Bahan/Mat  erial | Jumlah bahan yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah  kunjungan tamu yang difasilitasi | 100  orang | 100  orang | 2.400.000 | 200  ora ng | 4.800.000 | 200  orang | 4.800.000 | 200  ora ng | 4.800.000 | 200  ora ng | 4.800.000 | 200  orang | 4.800.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Penyeleng | Jumlah  rapat koordinasi dan konsultasi yang  dilaksanaka n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | garaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.09 | Rapat  Koordinasi dan | 312  kali | 322  kali | 80.000.000 | 322  kali | 80.000.00  0 | 322  kali | 80.000.000 | 322  kali | 80.000.000 | 322  kali | 80.000.000 | 322  kali | 80.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Penyeleng | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | garaan | | Jumllah rapat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.09 | Rapat  Koordinasi dan | | koordinasi  dan konsultasi yang | 100  kali | 305  kali | 69.700.000 | 305  kali | 70.000.52  2 | 310  kali | 71.819.879 | 310  kali | 72.970.950 | 320  kali | 74.936.916 | 320  kali | 74.936.91  6 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Konsultasi | | dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKPD | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penatausa | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 06.10 | haan Arsip  Dinamis pada | | Arsip  Dinamis yang ditata- | ` |
|  | SKPD | | usahakan |  |
|  | Dukungan  Pelaksana | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an Sistem | | fasilitas |
| x.xx.01.2. 06.11 | Pemerinta han  Berbasis | | pendukung  sistem peme rintahan |
|  | Elektronik | | berbasis |
|  | pada  SKPD | | elektronik |
|  |  | Pengadaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 07. | F | Barang Milik  Daerah  Penunjang Urusan | persentase Ketersediaan BMD |
|  |  | Pemerintah |  |
|  |  | Daerah |  |
|  | Pengadaa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n  Kendaraan | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 07.01 | Peroranga n Dinas  atau | | pengadaan  kendaraan dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 unit | 35.000.000 | 2  unit | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Kendaraan  Dinas | | jabatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jabatan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaa | | Jumlah kendaraan operasional yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | |
| x.xx.01.2. 07.02 | Kendaraan  Dinas Operasion | |
|  | al atau | |
|  | Lapangan | |
| x.xx.01.2. 07.05 | Pengadaa n Mebel | | Jumlah mebel yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaa | | pengadaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 07.06 | n  Peralatan dan Mesin | | peralatan  dan mesin (AC,Laptop,P | 10  unit | 10  unit | 52.381.000 | 100  % | 0 | 10  unit | 50.800.000 | 10  unit | 60.000.000 | 10  unit | 65.000.000 | 10 unit | 65.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Lainnya | | rinter,LCD,S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | ound Sistem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x.xx.01.2. 07.07 | Pengadaa n Aset Tetap Lainnya | | Jumlah asset tetap yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaa | | Jumlah gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipersiapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n Gedung | |
| x.xx.01.2. | Kantor | |
| 07.09 | atau | |
|  | Bangunan | |
|  | Lainnya | |
|  | Pengadaa | | Jumlah  pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Meja dan Kurs Camat/Sekc  am) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n Sarana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 07.10 | Prasarana  Gedung Kantor | | 2  buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  buah | 5.000.000 | 0 | 0 | 2  bua h | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | atau | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bangunan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lainnya | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaa | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipersiapkan (Kursi Tamu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n Sarana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prasarana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 07.11 | Pendukun  g Gedung Kantor | | 1 Set | 0 | 0 | 1  Set | 10.000.00  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  Set | 10.000.000 | 1 Set | 10.000.00  0 | Kec.  Bth | Kec. Bth |
|  | atau | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bangunan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lainnya | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan | Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jasa |  |  |
| x.xx.01.2. 08. | G | Penunjang  Urusan | 100 | 100 |
|  |  | Pemerintahan |  |  |
|  |  | Daerah |  |  |
|  |  | | Jumlah jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | surat |
| x.xx.01.2. | n Jasa | | menyurat |
| 08.01 | Surat | | yang |
|  | Menyurat | | dipersiapkan |
|  | Penyediaa | | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 08.02 | n Jasa  Komunika si, Sumber  Daya Air | | 3 jasa | 3 jasa | 12.767.675 | 3  jas a | 12.789.00  0 | 3 jasa | 12.789.000 | 3  jas a | 12.789.000 | 3  jas a | 12.789.000 | 3 jasa | 12.789.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | dan Listrik | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 08.02 | Penyediaa n Jasa Komunika  si, Sumber | | Jumlah jasa  komunikasi, air dan  listrik yang | 3 jasa | 3 jasa | 15.000.000 | 3  jas a | 15.000.22  2 | 3 jasa | 17.500.879 | 3  jas a | 18.799.000 | 3  jas a | 22.999.900 | 3 jasa | 22.999.90  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Daya Air | | disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dan Listrik | |  |
|  | Penyediaa | | Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 08.02 | n Jasa  Komunika  si, Sumber Daya Air | | 3 jasa | 3 jasa | 12.000.000 | 3  jas a | 12.000.00  0 | 3 jasa | 12.500.000 | 3  jas a | 13.000.000 | 3  jas a | 13.500.000 | 3 jasa | 13.500.00  0 | Kel. LBB | Kel. LBB |
|  | dan Listrik | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n Jasa | | peralatan |
| x.xx.01.2. | Peralatan | | dan |
| 08.03 | dan | | kelengkapan |
|  | Perlengka | | kantor yang |
|  | pan Kantor | | disediakan |
|  |  | | Jumlah jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | kantor uang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 08.04 | n Jasa Pelayanan  Umum | | disediakan  (ATK,  Honorarium | 4 jasa | 4 jasa | 243.181.60  0 | 4  jas a | 260.000.0  00 | 4 jasa | 260.000.000 | 4  jas a | 270.000.000 | 4  jas a | 305.000.00  0 | 4 jasa | 305.000.0  00 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Kantor | | PHL,BPJS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | PHL, Makan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Minum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Rapat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Jumlah jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | | kantor uang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 08.04 | n Jasa Pelayanan  Umum | | disediakan  (ATK,  Honorarium | 4 jasa | 4 jasa | 784.800.00  0 | 4  jas a | 784.002.1  20 | 4 jasa | 786.919.879 | 4  jas a | 798.970.220 | 4  jas a | 800.999.90  0 | 4 jasa | 800.999.9  00 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Kantor | | PHL,BPJS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | PHL, Makan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Minum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Rapat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barang Milik |  |
| x.xx.01.2. 09. | H | Daerah  Penunjang Urusan | % pemelihar an BMD |
|  |  | Pemerintahan |  |
|  |  | Daerah |  |
| x.xx.01.2. 09.05 | Pemelihar aan Mebel | | Jumlah mebel yang  dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemelihar | | peralatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 09.06 | aan Peralatan  dan Mesin | | dan mesin  yang ditingkatkan | 3 unit | 3 unit | 2.920.000 | 3  unit | 3.600.000 | 3 unit | 3.000.000 | 3  unit | 3.000.000 | 3  unit | 3.000.000 | 3 unit | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Lainnya | | usia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | pakainya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

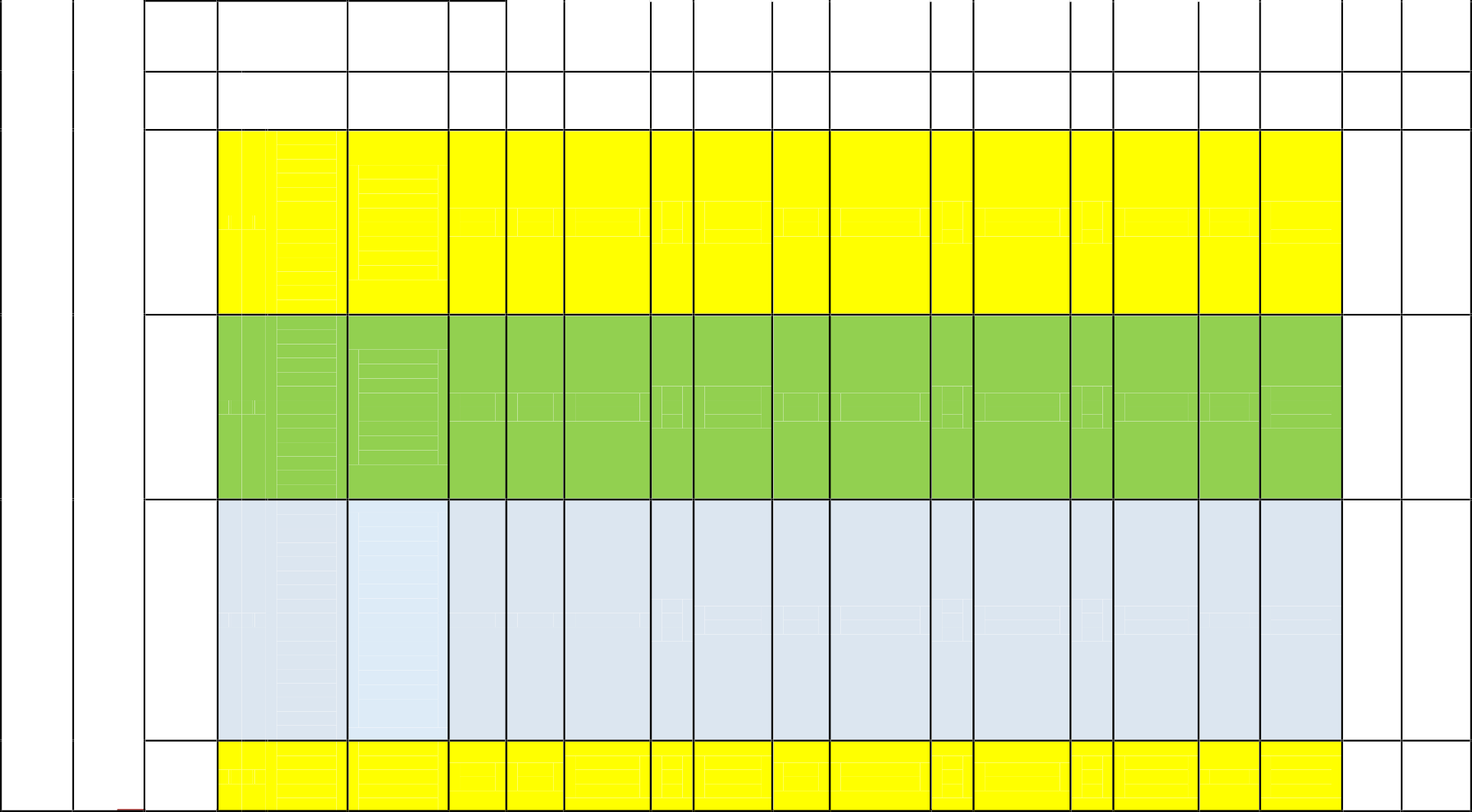
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemelihar | peralatan |  |  |
| x.xx.01.2. 09.06 | aan  Peralatan dan Mesin | dan mesin  yang ditingkatkan | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Lainnya | usia |  |  |
|  |  | pakainya |  |  |
| x.xx.01.2. 09.07 | Pemelihar aan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset yang ditingkatkan usia  pakainya | 3 unit | 6 unit | 3.600.000 | 6  unit | 3.600.000 | 6 unit | 3.600.000 | 6  unit | 3.600.000 | 6  unit | 3.600.000 | 6 unit | 3.600.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2. 09.08 | Pemelihar aan Aset Tak  Berwujud | Jumlah aset yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemelihar | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aan/Rehab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 09.09 | ilitasi  Gedung Kantor dan | 1 unit | 1 unit | 8.000.000 | 1  unit | 9.000.000 | 1 unit | 5.000.000 | 1  unit | 8.000.000 | 1  unit | 15.000.000 | 1 unit | 15.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Bangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemelihar | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aan/Rehab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 09.10 | ilitasi  Gedung Kantor dan | 1 unit | 1 unit | 25.000.000 | 1  unit | 23.053.90  8 | 1 unit | 27.209.879 | 1  unit | 29.950.350 | 1  unit | 32.989.950 | 1 unit | 32.989.95  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Bangunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemelihar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aan/Rehab  ilitasi | Jumlah |
|  | Sarana | Sarana dan |
| x.xx.01.2. 09.10 | dan Prasarana  Gedung | Prasarana  Gedung Kantor yang |
|  | Kantor  atau | direhabilitasi |
|  | Bangunan |  |
|  | Lainnya |  |
|  | Pemelihar | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aan/Rehab |
|  | ilitasi |
|  | Sarana |
|  | dan |
| x.xx.01.2. | Prasarana |
| 09.11 | Pendukun |
|  | g Gedung |
|  | Kantor |
|  | atau |
|  | Bangunan |
|  | Lainnya |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x.xx.01.2. 09.12 | Pemelihar aan/Rehab ilitasi  Tanah | | Jumlah tanah yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | n jasa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | pemelihar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | aan,biaya | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | pemelihar | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | aan dan | | kendaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 09.13 | pajak  kendaraan peroranga | | dinas yang  ditingkatkan umur | 7 unit | 7 unit | 49.980.000 | 7  unit | 60.000.00  0 | 7 unit | 60.000.000 | 7  unit | 65.000.000 | | 7  unit | 75.000.000 | 7 unit | 75.000.00  0 | Kec.  Bth | Kec. Bth |
|  | m dinas | | pakainya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | atau | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | kendaraan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | dinas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | jabatan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | n jasa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | pemelihar | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | aan,biaya | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | pemelihar | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | aan dan | | kendaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 09.13 | pajak  kendaraan peroranga | | dinas yang  ditingkatkan umur | 8 unit | 8 unit | 25.000.000 | 8  unit | 23.053.90  8 | 8 unit | 27.209.879 | 8  unit | 29.950.350 | | 8  unit | 32.989.950 | 8 unit | 32.989.95  0 | Kel.  LPB | Kel.  LPB |
|  | m dinas | | pakainya |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | atau | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | kendaraan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | dinas | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | jabatan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 10. | I | Peningkatan Pelayanan  BLUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelayanan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2. 10.01 | dan  Penunjang Pelayanan | |
|  | BLUD | |
|  |  |  | 7:00 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 7:01 | KECAMATAN | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mewujud | Meningk |  | **PROGRAM** | | **Peningkata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | kan Reforma  si Birokrasi | atnya keperca  yaan masyara | 7:01:02 | **PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN**  **DAN PELAYANAN** | | **n Pelayanan di Tk.**  **Kecamatan dan Desa/** | **30**  **menit** | **25**  **menit** | **27.500.000** | **20**  **me nit** | **47.876.47**  **5** | **15**  **menit** | **49.074.823** | **10**  **me nit** | **50.252.127** | | **8**  **me nit** | **51.451.143** | **8**  **menit** | **51.451.14**  **3** | **Kecam atan Bontoh aru** | **Kecamat an Bontohar u** |
|  | Daerah  (T-1) | kat  terhadap pelayan an (S-1) |  | **PUBLIK** | | **Kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.02.2.  01 | A | Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan  Pemerintahan | %  Penyelenggar aan kegiatan  pemerintaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | di Tingkat | n yang |
|  |  |  |  |  | Kecamatan | dikoordinasi |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi | | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasi kan (Penang gulangan Gizi Buruk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /Sinergi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perencana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  01.01 | Pemerinta  han dengan | | 1 keg | 0 | - | 1  keg | 20.000.00  0 | 1 keg | 20.500.600 | 1  keg | 20.992.409 | 1  keg | 21.493.288 | 1 keg | 21.493.28  8 | Kel.  LPB | Kel.  LPB |
|  | Perangkat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daerah | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instansi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikal | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terkait | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi | | Jumlah Perencanaan yang dikoordinasi kan (Penang gulangan Gizi Buruk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /Sinergi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perencana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  01.01 | Pemerinta  han dengan | | 1 keg | 1 keg | 20.000.000 | 1  keg | 20.273.80  0 | 1 keg | 20.781.253 | 1  keg | 21.279.795 | 1  keg | 21.787.531 | 1 keg | 21.787.53  1 | Kel.  LBB | Kel.  LBB |
|  | Perangkat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daerah | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instansi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikal | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terkait | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkat | | Jumlah Kegiatan Pemerintaha n yang ditingkatkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |
|  | Efektifitas | |
| 7.01.02.2.  01.02 | Kegiatan  Pemerinta han di | |
|  | Tingkat | |
|  | Kecamata | |
|  | n | |
|  |  | Penyelenggara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | an Urusan |  |
| 7.01.02.2.  02. | B | Pemerintahan  yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat  Daerah yang | % Urusan pemerintaha n yang diselenggara n |
|  |  | Ada di |  |
|  |  | Kecamatan |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Perencana | | Jumlah Kegiatan pelayanan yang direncanaka n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |
|  | Kegiatan | |
| 7.01.02.2.  02.01 | Pelayanan  kepada Masyaraka | |
|  | t di | |
|  | Kecamata | |
|  | n | |
|  | Fasilitasi Percepata | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | n | | percepatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  02.02 | Pencapaia  n Standar Pelayanan  Minimal di | | pencapaian  standar pelayanan minimal | 6  desa | 6  desa | 0 | 6  des a | 0 | 6  desa | 0 | 6  des a | 0 | | 6  des a | 0 | 6 desa | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Wilayah | | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamata  n | | difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkat an  Efektifitas | | kegiatan  Efektifitas Pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | | kepada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | an | | masyrakat di |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  02.03 | Pelayanan  kepada | | tingkat  Kecamatan | 2 keg | 2 keg | 7.500.000 | 1  keg | 3.602.675 | 1 keg | 3.792.970 | 1  keg | 3.979.923 | | 1  keg | 4.170.324 | 1 keg | 4.170.324 | Kec.  Bth | Kec. Bth |
|  | Masyaraka | | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | t di | | disusun ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Wilayah | | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamata  n | | Informasi  Kependuduk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinasi Pemeliharaan | % Sarana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  03. | C | Prasarana dan  Sarana | &Prasaranan  Umum yang |
|  |  | Pelayanan  Umum | dipelihara |
|  | Koordinasi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /Sinergi | |  |
|  | dengan | |  |
|  | Perangkat | |  |
|  | Daerah | |  |
|  | dan/atau  Instansi | | Jumlah |
|  | Vertikal | | sarana dan |
| 7.01.02.2. | yang | | prasarana |
| 03.01 | terkait | | Pelayanan |
|  | dalam | | umum yang |
|  | Pemelihar  aan | | dipelihara |
|  | Sarana | |  |
|  | dan | |  |
|  | Prasarana | |  |
|  | Pelayanan | |  |
|  | Umum | |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pelaksana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | |  |
|  | Pemelihar  aan | | Jumlah |
|  | Prasarana | | Prasaranan |
| 7.01.02.2.  03.02 | dan  Fasilitas Pelayanan | | dan Fasilita  s Pelayananan |
|  | Umum | | Umum yang |
|  | yang  Melibatkan | | dipelihara |
|  | Pihak | |  |
|  | Swasta | |  |
|  |  | Pelaksanaan | %Urusan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urusan | Pemerintaha |
| 7.01.02.2.  04. | D | Pemerintahan  yang | n Umum  yang |
|  |  | Dilimpahkan | dilimpahkan |
|  |  | kepada Camat |  |
|  | Pelaksana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an Urusan | |  |
|  | Pemerinta  han yang | | Jumlah |
| 7.01.02.2. | terkait | | Pelayanan |
| 04.01 | dengan | | Perizinan |
|  | Pelayanan | | Non Usaha |
|  | Perizinan | |  |
|  | Non | |  |
|  | Usaha | |  |
|  | Pelaksana | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an Urusan | |  |
| 7.01.02.2. | Pemerinta  han yang | | Jumlah Non |
| 04.02 | terkait | | Perizinan |
|  | dengan | |  |
|  | Nonperizin | |  |
|  | an | |  |
|  | Pelaksana  an Urusan Pemerinta | | Jumlah urusan  pemerintaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | han yang | | n yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.  04.03 | terkait  dengan Kewenang | | terkait  kewenangan yang | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | 4.000.000 | 1 dok | 4.000.000 | 1  dok | 4.000.000 | 1  dok | 4.000.000 | 1 dok | 4.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | an Lain | | dilimpahkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | yang | | (Penyusunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dilimpahk | | Propil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | | Kecamatan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Meningk atkan keberda yaan masyara  kat | Meningk atkan kafasitas dan Fasilitas  perdesa | **7:01:03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaa**  **n** | **100** | **100** | **1.800.903.5**  **25** | **100** | **1.825.557**  **.894** | **100** | **1.871.251.609** | **100** | **1.916.142.93**  **4** | **100** | **1.961.862.**  **106** | **100** | **1.961.862.**  **106** | **Kec.B th** | **Kec.Bth** |



perdesa an (T-2)

an (S-2)

**Pembangun an (%)**

7.01.03.2.

01.

A

7.01.03.2.

01.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkat an Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa

Peningkat an Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa

Sinkronisa si Program Kerja dan Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t yang Dilakukan oleh Pemerinta h dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamata n

Pembangu nan Sarana dan Prasarana

% Kegiatan Pemberdaya an Desa

**100**

**100**

1.769.463.5 **100**

25

1.792.617

.894

**100**

1.835.811.609

Kec.Bt

h Kec.Bth

Jumlah masyarakat yang berpartisipas i dalam Forum Musrenbang Desa/Kel

50

0rang

50

0rang

12.500.000

50

0ra ng

13.921.93

0

50

0rang

16.861.553

50

0ra ng

17.448.637

60

0ra ng

20.325.477

60

0rang

20.325.47

7

Kel. LPB

Kel. LPB

7.01.03.2.

01.01

Jumlah masyarakat yang berpartisipas i dalam Forum Musrenbang Desa/Kel

50

Orang

50

Orang

50

10.000.000 Ora ng

15.000.00

0

50

Orang

17.000.000

50

Ora ng

19.000.000

70

Ora ng

20.000.000

70

Orang

20.000.00

0

Kel. LBB

Kel. LBB

7.01.03.2.

01.02

Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat yang disinkronka n (Pembinaan Kampung KB dan Penaganan Gizi buruk)

2 Keg 2 Keg

8.500.000

2

Ke g

8.862.785

2

Keg

9.535.161

2

Ke g

9.695.729

2

Ke g

9.868.479

2 Keg

9.868.479

Kec. Bth

Kec. Bth

7.01.03.2.

01.03

Jumlah Pembanguna n sarana dan prasarana di Kelurahan

11

Unit

11

Unit

415.000.00

0

11

Uni t

416.971.9

30

11

Unit

419.573.073

11

Uni t

429.321.158

11

Uni t

432.540.49

6

11 Unit

432.540.4

96

Kel. LPB

Kel. LPB



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **100** | 1.875.702.93 | **100** | 1.915.422. | **100** | 1.915.422. |
|  | 4 |  | 106 |  | 106 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kelurahan | Putabangun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembangu | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nan | Pembanguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.03 | Sarana  dan Prasarana | n Sarana dan  Prasarana di Kelurahan | 10  unit | 10  unit | 971.486.47  5 | 10  unit | 975.694.4  28 | 10  unit | 995.233.793 | 10  unit | 1.006.245.66  2 | 10  unit | 1.016.301.  763 | 10 unit | 1.016.301.  763 | Kel.  LBB | Kel.  LBB |
|  | Kelurahan | Bontobangun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Keg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemberdayaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemberda | n masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.04 | yaan  masyaraka t di | yang  terlaksana ( pelatihan- | 2 Keg | 2 Keg | 120.577.05  0 | 2  Ke g | 121.872.6  11 | 2 Keg | 125.112.813 | 2  Ke g | 127.140.643 | 2  Ke g | 130.435.28  6 | 2 Keg | 130.435.2  86 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Kelurahan | pelatihan bagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pelaku UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah Keg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemberdayaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemberda | n masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.04 | yaan  masyaraka t di | yang  terlaksana ( pelatihan- | 2 Keg | 2 Keg | 170.000.00  0 | 2  Ke g | 175.000.0  00 | 2 Keg | 180.000.000 | 2  Ke g | 190.000.000 | 2  Ke g | 200.000.00  0 | 2 Keg | 200.000.0  00 | Kel. LBB | Kel. LBB |
|  | Kelurahan | pelatihan bagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pelaku UMKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.05 | Evaluasi Kelurahan | evaluasi  kelurahan yang | 2 Keg | 2 Keg | 12.400.000 | 2  Ke g | 13.871.93  0 | 2 Keg | 17.099.193 | 2  Ke g | 18.950.637 | 2  Ke g | 21.535.520 | 2 Keg | 21.535.52  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  |  | dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.05 | Evaluasi Kelurahan | evaluasi  kelurahan yang | 1 Keg | 1 Keg | 6.000.000 | 1  Ke g | 6.500.000 | 1 Keg | 7.500.000 | 1  Ke g | 9.000.000 | 1  Ke g | 12.000.000 | 1 Keg | 12.000.00  0 | Kel. LBB | Kel. LBB |
|  |  | dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkat | Meningkatnya efektifitas pemberdayaa n masyarakat (Koordinasi Layanan Kecamatan Sehat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efektifitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.06 | Pemberda  yaan Masyaraka | 1 Keg | 1 Keg | 13.000.000 | 1  Ke g | 13.000.00  0 | 1 Keg | 13.000.000 | 1  Ke g | 13.500.000 | 1  Ke g | 14.000.000 | 1 Keg | 14.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | t di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wilayah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  01.06 | Efektifitas  Kegiatan Pemberda  yaan | Meningkatnya  efektifitas pemberdayaa  n masyarakat | 1 Keg | 1 Keg | 30.000.000 | 1  Ke g | 31.922.28  0 | 1 Keg | 34.896.023 | 1  Ke g | 35.400.468 | 1  Ke g | 38.415.085 | 1 Keg | 38.415.08  5 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Masyaraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wilayah Kecamata n | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.03.2.  02. | B | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat  an Tingkat Kecamatan | %  Pemberdaya an Lembaga Kemasyrakat  an | 100% | 100% | 31.440.000 |  | 32.940.00  0 |  | 35.440.000 |  | 40.440.000 |  | 46.440.000 |  | 46.440.00  0 |  |  |
| 7.01.03.2.  02.01 | Penyeleng garaan Lembaga Kemasyar akatan | | Jumlah Lembaga Kemasyarak atan (Aparatur yang melaksanak an pembinaan kemasyarak  atan) | 1  Lemb aga | 1  Lemb aga | 16.440.000 | 1  Le mb aga | 17.440.00  0 | 1  Lemb aga | 18.440.000 | 1  Le mb aga | 20.440.000 | 1  Le mb aga | 25.440.000 | 1  Lemba ga | 25.440.00  0 | Kel. LBB | Kel. LBB |
| 7.01.03.2.  02.02 | Penyediaa n Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyar akatn | | Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarak atan yang disediakan (Kegiatan Kelurahan  Sehat) | 3 Unit | 3 Unit | 10.000.000 | 3  Uni t | 10.500.00  0 | 3 Unit | 12.000.000 | 3  Uni t | 15.000.000 | 3  Uni t | 16.000.000 | 3 Unit | 16.000.00  0 | Kel. LBB | Kel. LBB |
| 7.01.03.2.  02.03 | Fasilitasi pengemba ngan usaha ekonomi  masyaraka t | | Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi | 2 klp | 2 klp | 5.000.000 | 2  klp | 5.000.000 | 2 klp | 5.000.000 | 2  klp | 5.000.000 | 2  klp | 5.000.000 | 2 klp | 5.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  |  | 7:01:04 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**  **KETERTIBAN UMUM** | | **Persentase Kasus Kriminalita s di Tingkat**  **Kecamatan (%)** | **N/A** | **1,00** | **443.700.00**  **0** | **1,0**  **0** | **449.774.2**  **53** | **1,00** | **461.032.102** | **1,0**  **0** | **472.092.264** | **1,0**  **0** | **483.356.38**  **4** | **1,00** | **483.356.3**  **84** | **Kecam atan Bontoh aru** | **Kecamat an Bontohar u** |
| 4 | Meningk atnya Kapasita s Kelenba gaan keagam aan (T- 10) | Meningk atnya fasilitasi pelayan an keagam aan  (S-10) | 7.01.04.2.  01. | A | Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman  dan Ketertiban Umum | % Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | **N/A** | **1,00** | 433.700.00  0 | **1,0**  **0** | 439.653.8  53 | **1,00** | 450.811.849 | **1,0**  **0** | 461.812.468 | **1,0**  **0** | 473.021.10  4 | **1,00** | 473.021.1  04 |  |  |
| 7.01.04.2.  01.01 | Sinergitas  dengan Kepolisian Negara Republik  Indonesia, Tentara | | Jumlah  Koordinasi dengan Tripika dan Instansi  Vertikal terkait di Wilayah | 1 Keg | 1 Keg | 20.000.000 | 1  dok | 20.273.80  0 | 1 Keg | 20.781.253 | 1  Ke g | 21.279.796 | 1  Ke g | 21.787.532 | 1 Keg | 21.787.53  2 | Kec. Bth | Kec. Bth |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah  Kecamata n | | Kecamatan yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.04.2.  01.01 | Sinergitas dengan  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata  n | | Jumlah Koordinasi dengan Tripika dan Instansi Vertikal terkait di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan | 1 Keg | 1 Keg | 10.000.000 | 1  Ke g | 10.153.40  0 | 1 Keg | 10.561.000 | 1  Ke g | 11.000.000 | 1  Ke g | 11.452.251 | 1 Keg | 11.452.25  1 | Kel. LPB | Kel. LPB |
| 7.01.04.2.  01.02 | Harmonisa si Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka  t | | Persentase hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di harmonisasika  n | 100% | 100% | 403.700.00  0 | 100  % | 409.226.6  53 | 100% | 419.469.596 | 100  % | 429.532.672 | 100  % | 439.781.32  1 | 100% | 439.781.3  21 | Kel.LB B | Kel.LBB |
| 7.01.04.2.  02. | B | Koordinasi  Penerapan dan Penegakan Perda dan  Perkada | % penerpan  dan penegakan perda dan  perkada | 100% | 100% | 10.000.000 |  | 10.120.40  0 |  | 10.220.253 |  | 10.279.796 |  | 10.335.280 |  | 10.335.28  0 |  |  |
| 7.01.04.2.  02.01 | Koordinasi  /Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegaka n peraturan perundang  -undangan dan/atau kepolisian Negara Republik  Indonesia | | Jumlah Kegiatan penegakan Peraturan perundang- undangan yang dikoordinasika n (Penertiban ternak liar terlaksana sesuai perda dan berkurangnya persentase kasus illegal logging) | 2 Keg | 2 Keg | 10.000.000 | 2  Ke g | 10.120.40  0 | 2 Keg | 10.220.253 | 2  Ke g | 10.279.796 | 2  Ke g | 10.335.280 | 2 Keg | 10.335.28  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | 7:01:05 | **PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Persentase**  **Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat**  **Kecamatan (%)** | **0,00** | **0,00** | **70.000.000** | **0,0**  **0** | **70.958.30**  **0** | **0,00** | **72.734.387** | **0,0**  **0** | **74.479.285** | **0,0**  **0** | **76.256.361** | **0,00** | **76.256.36**  **1** | **Kecam atan Bontoh aru** | **Kecamat an Bontohar u** |
| 5 | Meningk  atkan aktualisa si nilai budaya (T-5) | Meningk  atnya upaya pelestari an nilai- nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengakt ualisasik an pada kehidup an sosial (S-9) | 7.01.05.2.  01. | A | Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah  kegiatan Urusan Pemerintaha n Umum yang di selenggaraka  n | 2 Keg | 2 Keg | **70.000.000** | 2  Ke g | 70.958.30  0 | 2 Keg | 72.734.387 | 2  Ke g | 74.479.285 | 2  Ke g | 76.256.361 | 2 Keg | 76.256.36  1 |  |  |
| 7.01.05.2.  01.01 | Pembinaa  n Wawasan Kebangsa an dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertaha nan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia | | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 2 Keg | 2 Keg | 23.000.000 | 2  Ke g | 23.684.50  0 | 2 Keg | 24.953.133 | 2  Ke g | 26.199.489 | 2  Ke g | 27.468.829 | 2 Keg | 27.468.82  9 | Kec. Bth | Kec. Bth |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.01.05.2.  01.01 | Pembinaa n Wawasan Kebangsa an dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantap kan Pengamal an Pancasila, Pelaksana an Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertaha nan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia | Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional yang dilaksanakan | 2 Keg | 2 Keg | 5.000.000 | 2  Ke g | 5.136.900 | 2 Keg | 5.237.227 | 2  Ke g | 5.445.123 | 2  Ke g | 5.653.566 | 2 Keg | 5.653.566 | Kel. LPB | Kel. LPB |
| 7.01.05.2.  01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaa n (Bimtek, Sosialisasi  ,  Konsultasi  )  Wawasan Kebangsa an dan  Ketahanan Nasional | Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanaka n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.01.05.2.  01.03 | Pembinaa  n Persatuan dan Kesatuan  Bangsa | Jumlah  Pembinaan P ersatuan dan Kesatuan  Bangsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.  01.04 | Pembinaa  n Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudk an Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan  Nasional | Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ra s dan golongan lainnya yang dilaksanaka n | 1 keg | 1 keg | 27.000.000 | 1  keg | 27.000.00  0 | 1 keg | 27.000.000 | 1  keg | 27.000.000 | 1  keg | 27.000.000 | 1 keg | 27.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.05.2.  01.04 | Pembinaa  n Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudk an Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan  Nasional | Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ra s dan golongan lainnya yang dilaksanaka n | 1 keg | 1 keg | 5.000.000 | 1  keg | 5.000.000 | 1 keg | 5.153.400 | 1  keg | 5.194.775 | 1  keg | 5.240.200 | 1 keg | 5.240.200 | Kel. LPB | Kel. LPB |
| 7.01.05.2.  01.04 | Pembinaa  n Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan  Lainnya | Jumlah  kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama,ra s dan  golongan lainnya yang | 2 keg | 2 keg | 10.000.000 | 2  keg | 10.136.90  0 | 2 keg | 10.390.627 | 2  keg | 10.639.898 | 2  keg | 10.893.766 | 2 keg | 10.893.76  6 | Kel. LBB | Kel. LBB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | Guna mewujudk an Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan  Nasional | dilaksanaka n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.  01.05 | Penangan an Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang  -  Undangan | Jumlah konflik yang ditangani |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.  01.06 | Pengemba ngan Kehidupan Demokrasi Berdasark  an Pancasila | Jumlah kegiatan pen gembangan kehidupan demokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.  01.07 | Pelaksana an Semua Urusan Pemerinta han yang Bukan Merupaka n Kewenang an Daerah dan Tidak Dilaksanak an oleh Instansi  Vertikal | Jumlah urusan pemerintaha n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.  01.08 | Pelaksana an Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamata  n | Jumlah Forum koordinasi pimpinan yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | |  | 7:01:06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase program pemerintah an desa yang mendukung** | **40** | **50** | **145.600.00**  **0** | **55** | **147.593.2**  **64** | **60** | **151.287.524** | **65** | **154.916.911** | | **70** | **158.613.22**  **8** | **70** | **158.613.2**  **28** | **Kecam atan Bontoh aru** | **Kecamat an Bontohar u** |
|  |  | **program** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | **pemerintah (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi, | pembinaan |
|  |  |  | Rekomendasi | dan |
|  |  |  | dan Koordinasi | Pengawasan |
|  | 7.01.06.2.  01 | A | Pembinaan  dan | yagn  difasiitasi, |
|  |  |  | Pengawasan | direkomenda |
|  |  |  | Pemerintahan | si, |
|  |  |  | Desa | dikoordinasi |
|  |  |  |  | kan |
|  |  | Fasilitasi | | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusun | |
|  |  | an | |
|  | 7.01.06.2. | Peraturan | |
|  | 01.01 | Desa dan | |
|  |  | Peraturan | |
|  |  | Kepala | |
|  |  | Desa | |
|  |  |  | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06.2.  01.02 | Fasilitasi Administra si Tata Pemerinta han Desa | | kegiatan tata pemerintaha n desa/kel yang difasilitasi  (Lomba | 1 Keg | 1 Keg | 17.000.000 | 1  Ke g | 15.944.61  0 | 1 Keg | 16.895.324 | 1  Ke g | 16.415.294 | 1  Ke g | 16.666.983 | 1 Keg | 17.166.98  3 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  |  | | desa/kel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi | | Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengelola | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06.2.  01.03 | an  Keuangan  Desa dan Pendayag | | 1 Keg | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 0 | 1 Keg | 2.800.000 | 1  Ke g | 2.000.000 | 1  Ke g | 2.500.000 | 1 Keg | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | unaan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aset Desa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi | | Jumlah penerapan dan penegakan perundang- undangan yang difasiitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penerapan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06.2.  01.04 | Penegaka  n Peraturan | | 1  Perda | 1  Perda | 3.000.000 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1  Perda | 3.000.000 | 1  Per da | 3.000.000 | 1  Per da | 3.000.000 | 1  Perda | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | Perundang | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Undangan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Pelaksana | | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06.2.  01.05 | an Tugas  Kepala Desa dan | | pelaksanaan  kepala desa yang |
|  |  | Perangkat  Desa | | difasilitasi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fasilitasi | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | Pelaksanaan |  |
| 7.01.06.2. | an | pemilihan | 2 |
| 01.06 | Pemilihan | kepala desa | Desa |
|  | Kepala | yang |  |
|  | Desa | difasilaitasi |  |
|  | Fasilitasi  Pelaksana | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an Tugas | kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.07 | dan Fungsi  Badan | pelaksanaan  tugas dan fungsi BPD | 1 Keg | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 0 | 1  Ke g | 0 | 1 Keg | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Permusya | yagn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | waratan  Desa | difaslitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekomend | Jumlah Pengangkata n dan pemberhenti an perangkat desa yagn direkomenda  sikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | asi |
|  | Pengangk |
| 7.01.06.2. | atan dan |
| 01.08 | Pemberhe |
|  | ntian |
|  | Perangkat |
|  | Desa |
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Sinkronisa | Kegiatan  Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | si | pembanguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perencana | n Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.09 | an Pembangu  nan | dengan  Pembanguna Desa yang | 1 Keg | 1 Keg | 3.000.000 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1 Keg | 3.000.000 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1 Keg | 3.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Daerah | disingkronka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dengan | n (Fasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembangu | dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nan Desa | Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PBB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penetapan | kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.10 | Lokasi  Pembangu nan | pembanguna  n kawasan perdesaan | 1 Keg | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 0 | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 3.000.000 | 1  Ke g | 2.000.000 | 1 Keg | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Kawasan | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perdesaan | difasilitsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.11 | Fasilitasi Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiban Umum | Kegiatan  penyelenggar aan ketenterama n dan ketertiban umum yang  difasiitasi | 1 Keg | 1 Keg | 4.000.000 | 1  Ke g | 4.000.000 | 1 Keg | 4.000.000 | 1  Ke g | 4.000.000 | 1  Ke g | 4.000.000 | 1 Keg | 4.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | (Sosialisasi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fasilitasi | Jumlah kegiatan penyelenggar aan ketenteraman dan ketertiban umum yang  difasiitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyeleng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.11 | garaan  Ketentera man dan | 1 Keg | 1 Keg | 9.600.000 | 100  % | 9.731.424 | 100% | 9.975.002 | 100  % | 10.214.302 | 100  % | 10.458.015 | 100% | 10.458.01  5 | Kel. LBB | Kel. LBB |
|  | Ketertiban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Pelaksana | Jumlah  Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.12 | an Tugas, Fungsi, dan Kewajiban  Lembaga | kemasyarak  atan yag difasilitasi  pelaksanaan tugas dan | 9  Lemb aga | 9  Lemb aga | 13.000.000 | 9  Le mb aga | 13.000.00  0 | 9  Lemb aga | 13.000.000 | 9  Le mb aga | 13.000.000 | 9  Le mb aga | 13.000.000 | 9  Lemba ga | 13.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Kemasyar | fungsinya (P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | akatan | KK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana | Lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.12 | an Tugas, Fungsi, dan  Kewajiban Lembaga | kemasyarak  atan yag difasilitasi pelaksanaan  tugas dan | 2  Lemb aga | 2  Lemb aga | 37.000.000 | 2  Le mb aga | 37.500.00  0 | 2  Lemb aga | 38.417.000 | 2  Le mb aga | 39.127.500 | 2  Le mb aga | 40.450.230 | 2  Lemba ga | 40.450.23  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | Kemasyar | fungsinya (P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | akatan | KK dan LPM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi | Jumlah Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif yang difasilitasi (Musrenbang  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.13 | an  Perencana an  Pembangu | 1 Keg | 1 Keg | 16.000.000 | 1  Ke g | 16.000.00  0 | 1  Keg | 16.000.000 | 1  Ke g | 16.000.000 | 1  Ke g | 16.000.000 | 1 Keg | 16.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | nan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partisipatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kerja |  |
|  | Sama  Antardesa | Jumlah |
| 7.01.06.2. | dan Kerja | kerjasama |
| 01.14 | Sama | yang |
|  | Desa  Dengan | difasilitasi |
|  | Pihak |  |
|  | Ketiga |  |
|  |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaat an, dan Pendayag unaan Ruang Desa Serta Penetapan  dan | Jumlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penataan, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemanfaatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.15 | Pendayagun  aan Ruang Desa Serta | 1 dok | 1 dok | 0 | 1  dok | - | 1 dok | 1  dok | - | 1  dok | 2.000.000 | 1 dok | 2.000.000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | Penetapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penegasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Batas Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Penegasa | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n Batas | difasilitasi |
| Desa |  |
|  | Fasilitasi | Jumlah penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdaya an Masyarakat Desa yang difasilitasi (Asistensi dan Pembinaan  APBDes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.16 | dan  Pelaksana an  Pemberda | 2 Keg | 2 Keg | 13.000.000 | 2  Ke g | 12.000.00  0 | 2 Keg | 13.000.000 | 2  Ke g | 13.000.000 | 2  Ke g | 13.000.000 | 2 Keg | 13.000.00  0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | yaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masyaraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t Desa dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi | Jumlah Pen dampingan Desa yang dikoorinasik an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pendampi |  |
| 7.01.06.2.  01.17 | ngan Desa  di | 0 |
|  | Wilayahny |  |
|  | a |  |
|  | Koordinasi Pelaksana | Jumlah  kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an | pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.18 | Pembangu nan Kawasan  Perdesaan | pembanguna  n kawasan  pedesaan/ke lurahan | 1 Keg | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 0 | 1 Keg | 0 | 1  Ke g | 0 | 1  Ke g | 0 | 1 Keg | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | di Wilayah | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamata | dikoordinasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi | Jumlah Kegiatan Pengawasan pembangunan kawasan pedesaan/kel urahan yang dikoordinasika n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.  01.18 | Pembangu  nan  Kawasan Perdesaan | 2 Keg | 2 Keg | 30.000.000 | 2  Ke g | 30.417.23  0 | 2 Keg | 31.200.198 | 2  Ke g | 32.159.815 | 2  Ke g | 32.538.000 | 2 Keg | 32.538.00  0 | Kel. LPB | Kel. LPB |
|  | di Wilayah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kecamata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | | | | **6.679.492.052** | | **6.770.934.298** | | **6.940.410.784** | | **7.106.911.239** | | **7.276.482.141** | | **7.276.482.141** | |  |

**TABEL 6.2**

**Perubahan Rencana, Program,Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontoharu**

**Kabuapaten Kepulauan Selayar**

**Tahun 2021-2026**

**(Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** |  |
| **Tahun-1 (2022)** | | **Tahun-2 (2023)** | | **Tahun-3 (2024)** | | **Tahun-4 (2025)** | | **Tahun-5 (2026)** | |  |
| **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** | | **(10)** | | **(11)** | | **(12)** | |  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **K** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp** | **(13)** |  |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontoharu |  |  |  | Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Bontoharu | 0 | 55 |  | 64 |  | 68 |  | 73 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |
|  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bontoharu |  |  | Nilai Sakip Kecamatan | 0 | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 76 |  | 76 |  |  |  |
|  |  | Laporan Keuangan Kecamatan Bontoharu sesuai SAP | 0 | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  |  |  |
|  |  | Indeks Kepuasan Mastyarakat Kecamatan Bontoharu | 0 | 70 |  | 72,50 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  |  |  |
|  |  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja | 50,91 | 63,03 | 4,164,568,492 | 70,28 | 4,201,581,435 | 70,53 | 4,306,747,018 | 71,51 | 4,410,065,879 | 72,31 | 4,515,290,051 | 72,31 | 21,598,252,875 | BTH |  |
| Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 79,35 | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  |  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 79,35 | 83 | 13,000,000 | 85 | 15,000,000 | 88 | 12,500,000 | 91 | 13,000,000 | 95 | 13,500,000 | 95 | 67,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | 4 | 6,000,000 | 4 | 6,000,000 | 4 | 5,500,000 | 4 | 6,000,000 | 4 | 6,500,000 | 20 | 30,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 10 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 5 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 5 | 6,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 2,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 10 | 11,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 2,646,822,217 | 100 | 2,680,679,610 | 100 | 2,694,579,218 | 100 | 2,740,623,131 | 100 | 2,777,214,751 | 100 | 13,539,918,927 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | 30 | 2,463,456,342 | 30 | 2,493,144,456 | 30 | 2,502,507,161 | 30 | 2,542,560,533 | 30 | 2,575,164,777 | 150 | 12,576,833,269 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 2 | 2 | 180,365,875 | 2 | 182,535,154 | 2 | 187,072,057 | 2 | 192,062,598 | 2 | 196,049,974 | 10 | 938,085,658 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 10 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 0 | 100 | 2,000,000 | 100 | 2,000,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik | 100 | 100 | 37,000,000 | 100 | 52,000,520 | 100 | 45,719,879 | 100 | 53,150,798 | 100 | 60,999,900 | 100 | 248,871,097 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,000,000 | 0 | 0 | 16 | 8,000,000 | 0 | 0 | 32 | 16,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 11,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | 0 | 0 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 20,000,000 | 12 | 65,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 4 | 7 | 35,000,000 | 5 | 25,000,520 | 5 | 26,719,879 | 5 | 26,150,798 | 6 | 33,999,900 | 28 | 146,871,097 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum kantor | 100 | 100 | 233,116,000 | 100 | 235,802,147 | 100 | 245,418,405 | 100 | 252,233,030 | 100 | 262,706,700 | 100 | 1,229,276,282 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,550 | 1 | 919,879 | 1 | 960,140 | 1 | 989,900 | 5 | 10,870,469 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) | 20 | 20 | 82,000,000 | 12 | 82,000,552 | 12 | 91,519,879 | 12 | 94,350,950 | 15 | 99,989,984 | 71 | 449,861,365 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) | 4 | 4 | 10,996,000 | 4 | 10,000,523 | 4 | 11,358,768 | 4 | 14,150,990 | 4 | 16,989,900 | 20 | 63,496,181 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | 2 | 4,020,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 10 | 24,020,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 2 | 2 | 2,400,000 | 2 | 4,800,000 | 2 | 4,800,000 | 2 | 4,800,000 | 2 | 4,800,000 | 10 | 21,600,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 412 | 617 | 129,700,000 | 617 | 130,000,522 | 622 | 131,819,879 | 632 | 132,970,950 | 642 | 134,936,916 | 3130 | 659,428,267 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan BMD | 100 | 100 | 52,381,000 | 100 | 10,000,000 | 100 | 90,800,000 | 100 | 95,000,000 | 100 | 80,000,000 | 100 | 328,181,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35,000,000 | 2 | 35,000,000 | 0 | 0 | 4 | 70,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 10 | 52,381,000 | 0 | 0 | 10 | 50,800,000 | 10 | 60,000,000 | 10 | 65,000,000 | 40 | 228,181,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2 | 5,000,000 | 4 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 1,067,749,275 | 100 | 1,083,791,342 | 100 | 1,089,709,758 | 100 | 1,113,558,220 | 100 | 1,155,288,800 | 100 | 5,510,097,395 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | 36 | 39,767,675 | 36 | 39,789,222 | 36 | 42,789,879 | 36 | 44,588,000 | 36 | 49,288,900 | 180 | 216,223,676 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 24 | 24 | 1,027,981,600 | 24 | 1,044,002,120 | 24 | 1,046,919,879 | 24 | 1,068,970,220 | 24 | 1,105,999,900 | 120 | 5,293,873,719 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | 100 | 100 | 114,500,000 | 100 | 122,307,816 | 100 | 126,019,758 | 100 | 139,500,700 | 100 | 162,579,900 | 100 | 664,908,174 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 15 | 15 | 74,980,000 | 15 | 83,053,908 | 15 | 87,209,879 | 15 | 94,950,350 | 15 | 107,989,950 | 75 | 448,184,087 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) | 3 | 3 | 2,920,000 | 3 | 3,600,000 | 3 | 3,000,000 | 3 | 3,000,000 | 3 | 3,000,000 | 15 | 15,520,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | 6 | 3,600,000 | 6 | 3,600,000 | 6 | 3,600,000 | 6 | 3,600,000 | 6 | 3,600,000 | 30 | 18,000,000 | BTH |  |
|  |  | 0.00.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | 2 | 33,000,000 | 2 | 32,053,908 | 2 | 32,209,879 | 2 | 37,950,350 | 2 | 47,989,950 | 10 | 183,204,087 | BTH |  |
|  |  | 7.01.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan di kecamatan | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 | 25 | 27,500,000 | 20 | 47,876,475 | 15 | 49,074,823 | 10 | 50,252,128 | 8 | 51,451,144 | 8 | 226,154,570 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan | 100 | 100 | 21,000,000 | 100 | 41,273,800 | 100 | 42,281,853 | 100 | 43,272,205 | 100 | 44,280,820 | 100 | 192,108,678 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 2 | 2 | 20,000,000 | 2 | 40,273,800 | 2 | 41,281,853 | 2 | 42,272,205 | 2 | 43,280,820 | 10 | 187,108,678 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 5 | 5,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase urusan pemerintahan yang diselenggarakan | 100 | 100 | 6,500,000 | 100 | 2,602,675 | 100 | 2,792,970 | 100 | 2,979,923 | 100 | 3,170,324 | 100 | 18,045,892 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 2,500,000 | 1 | 1,602,675 | 1 | 1,792,970 | 1 | 1,979,923 | 1 | 2,000,000 | 5 | 9,875,568 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,170,324 | 5 | 8,170,324 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase sarana dan prasarana umum yang dipelihara | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan | 100 | 100 | 0 | 100 | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | 100 | 16,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 5 | 16,000,000 | BTH |  |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontoharu |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontoharu | 0 | 0,6300 |  | 0,6650 |  | 0,7000 |  | 0,7150 |  | 0,7300 |  | 0,7300 |  | BTH |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang dikoordinasikan | 0 | 63 |  | 66 |  | 70 |  | 71 |  | 73 |  | 73 |  |  |  |
|  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan | 100 | 100 | 1,800,903,525 | 100 | 1,825,557,894 | 100 | 1,871,251,608 | 100 | 1,916,142,934 | 100 | 1,961,862,105 | 100 | 9,375,718,066 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase kegiatan pemberdayaan desa | 100 | 100 | 51,500,000 | 100 | 53,785,065 | 100 | 57,431,183 | 100 | 58,596,197 | 100 | 62,283,563 | 100 | 283,596,008 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 2 | 2 | 8,500,000 | 2 | 8,862,785 | 2 | 9,535,161 | 2 | 9,695,729 | 2 | 9,868,479 | 10 | 46,462,154 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 2 | 43,000,000 | 2 | 44,922,280 | 2 | 47,896,022 | 2 | 48,900,468 | 2 | 52,415,084 | 10 | 237,133,854 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan | 100 | 100 | 1,717,963,525 | 100 | 1,738,832,829 | 100 | 1,778,380,425 | 100 | 1,817,106,737 | 100 | 1,853,138,542 | 100 | 8,905,422,058 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasy) | 10 | 10 | 22,500,000 | 10 | 28,921,930 | 10 | 33,861,553 | 10 | 36,448,637 | 10 | 40,325,477 | 50 | 162,057,597 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit) | 21 | 20 | 1,386,486,475 | 20 | 1,392,666,358 | 20 | 1,414,806,866 | 20 | 1,435,566,820 | 20 | 1,448,842,259 | 100 | 7,078,368,778 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | 4 | 290,577,050 | 4 | 296,872,611 | 4 | 305,112,813 | 4 | 317,140,643 | 4 | 330,435,286 | 20 | 1,540,138,403 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 3 | 3 | 18,400,000 | 3 | 20,371,930 | 3 | 24,599,193 | 3 | 27,950,637 | 3 | 33,535,520 | 15 | 124,857,280 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 100 | 100 | 31,440,000 | 100 | 32,940,000 | 100 | 35,440,000 | 100 | 40,440,000 | 100 | 46,440,000 | 100 | 186,700,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | 1 | 16,440,000 | 1 | 17,440,000 | 1 | 18,440,000 | 1 | 20,440,000 | 1 | 25,440,000 | 5 | 98,200,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana LembagaKemasyarakatan yang Disediakan (Unit) | 3 | 3 | 10,000,000 | 3 | 10,500,000 | 3 | 12,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 16,000,000 | 15 | 63,500,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat (Laporan) | 2 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 2 | 5,000,000 | 10 | 25,000,000 | BTH |  |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kerifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontoharu |  |  |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Bontoharu | 0 | 0,6900 |  | 0,7000 |  | 0,7100 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  |  |  |
|  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat |  |  | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 0 | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 71,5 |  | 71,5 |  | 71,5 |  | BTH |  |
|  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan | 0 | 1 | 443,700,000 | 1 | 449,774,253 | 1 | 461,032,102 | 1 | 472,092,264 | 1 | 483,356,384 | 1 | 2,309,955,003 | BTH |  |
|  |  | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 0 | 1 | 433,700,000 | 1 | 439,653,853 | 1 | 450,811,849 | 1 | 461,812,468 | 1 | 473,021,104 | 1 | 2,258,999,274 | BTH |  |
|  |  | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 2 | 2 | 30,000,000 | 2 | 30,427,200 | 2 | 31,342,253 | 2 | 32,279,796 | 2 | 33,239,783 | 10 | 157,289,032 | BTH |  |
|  |  | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 403,700,000 | 1 | 409,226,653 | 1 | 419,469,596 | 1 | 429,532,672 | 1 | 439,781,321 | 5 | 2,101,710,242 | BTH |  |
|  |  | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase penerapan dan penegakan Perda dan Perkada | 100 | 100 | 10,000,000 | 100 | 10,120,400 | 100 | 10,220,253 | 100 | 10,279,796 | 100 | 10,335,280 | 100 | 50,955,729 | BTH |  |
|  |  | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan) | 2 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,120,400 | 2 | 10,220,253 | 2 | 10,279,796 | 2 | 10,335,280 | 10 | 50,955,729 | BTH |  |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontoharu |  |  |  | Indeks Kesolehan Sosial Kecamatan Bontoharu | 0 | 63,00 |  | 65,15 |  | 67,30 |  | 70,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  |  |
|  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu |  |  | Meningkatnya toleransi Kehidupan Sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontoharu | 0 | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
|  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,958,300 | 0 | 72,734,386 | 0 | 74,479,284 | 0 | 76,256,360 | 0 | 364,428,330 | BTH |  |
|  |  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan | 4 | 4 | 70,000,000 | 4 | 70,958,300 | 4 | 72,734,386 | 4 | 74,479,284 | 4 | 76,256,360 | 4 | 364,428,330 | BTH |  |
|  |  | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indo (Orang) | 250 | 300 | 28,000,000 | 300 | 28,821,400 | 300 | 30,190,360 | 300 | 31,644,612 | 350 | 33,122,395 | 1550 | 151,778,767 | BTH |  |
|  |  | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang) | 300 | 300 | 42,000,000 | 300 | 42,136,900 | 300 | 42,544,026 | 300 | 42,834,672 | 300 | 43,133,965 | 1500 | 212,649,563 | BTH |  |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontoharu |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontoharu | 0 | 0,6300 | 6,652,272,017 | 0,6650 | 6,743,341,621 | 0,7000 | 6,912,127,460 | 0,7150 | 7,077,949,400 | 0,7300 | 7,246,829,273 | 0,7300 | 34,632,519,771 |  |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa |  |  | Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi | 0 | 100 | 6,652,272,017 | 100 | 6,743,341,621 | 100 | 6,912,127,460 | 100 | 7,077,949,400 | 100 | 7,246,829,273 | 100 | 34,632,519,771 |  |  |
|  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 40 | 50 | 145,600,000 | 55 | 147,593,264 | 60 | 151,287,523 | 65 | 154,916,911 | 70 | 158,613,229 | 70 | 758,010,927 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase pembinaan dan pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi dan dikoordinasikan | 40 | 50 | 145,600,000 | 55 | 147,593,264 | 60 | 151,287,523 | 65 | 154,916,911 | 70 | 158,613,229 | 70 | 758,010,927 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 1 | 1 | 17,000,000 | 1 | 15,944,610 | 1 | 16,895,324 | 1 | 16,415,294 | 1 | 16,666,983 | 5 | 82,922,211 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,800,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,500,000 | 5 | 7,300,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen) | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 1 | 2,000,000 | 2 | 5,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum (Dokumen) | 2 | 2 | 13,600,000 | 2 | 13,731,424 | 2 | 11,975,001 | 2 | 14,214,302 | 2 | 14,458,016 | 10 | 67,978,743 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 3 | 3 | 50,000,000 | 3 | 50,500,000 | 3 | 51,417,000 | 3 | 52,127,500 | 3 | 53,450,230 | 15 | 257,494,730 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | 1 | 16,000,000 | 1 | 16,000,000 | 1 | 16,000,000 | 1 | 16,000,000 | 1 | 16,000,000 | 5 | 80,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan PenegasanBatas Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 1 | 1 | 9,000,000 | 1 | 8,000,000 | 1 | 9,000,000 | 1 | 9,000,000 | 1 | 9,000,000 | 5 | 44,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan) | 1 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 5 | 10,000,000 | BTH |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan (Laporan) | 3 | 3 | 32,000,000 | 3 | 32,417,230 | 3 | 33,200,198 | 3 | 34,159,815 | 3 | 34,538,000 | 15 | 166,315,243 | BTH |  |
| **Total** | | | | | | | **6,652,272,017** |  | **6,743,341,621** |  | **6,912,127,460** |  | **7,077,949,400** |  | **7,246,829,273** |  | **34,632,519,771** | **BTH** |  |

t

**TABEL 6.3**

**Perubahan Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontoharu**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

**Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | KODE |  | | | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penang gung Jawab | Lokasi |
| Nomenklatur urusan (program / kegiatan / sub kegiatn | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | |
|  | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|  | | | Tar-get | Rp. (000.000) | Tar-get | Rp. (000.000) | Tar-get | Rp. (000.000) | Tar-get | Rp. (000.000) | Tar-get | Rp. (000.000) | Tar-get | Rp. (000.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah |  |  |  | | | Indeks Birokrasi Reformasi | 33,89 (C) |  |  |  |  |  |  | 73,00 (B) |  | 76,00 (A) |  | 76,00 (A) |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan |  |  | | | Nilai Sakip Kecamatan | 58.85 |  |  |  |  |  | 4,627,547,560 | 75 | 4,410,065,879 | 80 | 4,515,290,051 | 80 | 4,515,290,051 |  |  |
|  |  |  | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | Persentase Capaian Kinerja (%) | 50.91 |  |  |  |  |  | 4,627,547,560 | 71.5 | ######## | 72.3 | 4,515,290,051 | 72 | 4,515,290,051 | Kecamatan Bontoharu, Kel BTB, Kel PTB | Kecamatan Bontoharu, Kel BTB, Kel PTB |
|  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (T-1) | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (S1) | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 79.35 |  |  |  | 91,00 | 95.00 | ### |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 2,899,795,200 |  | ######## |  | 3,201,353,777 |  | 3,201,353,777 | Kecamatan Bontoharu | Kecamatan Bontoharu |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 1,006,067,170 |  | ######## |  | 172,520,074 |  | 172,520,074 | Kel BTB | Kel BTB |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 721,685,190 |  | ######## |  | 1,141,416,200 |  | 1,141,416,200 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.01 | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase dokumen/ Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 79.35 |  |  |  |  |  | 19,026,800 | 91.00 | 13,000,000 | 95.00 | 13,500,000 | 95.00 | 13,500,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.01.0001 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 dok |  |  |  |  |  | - | 2 dok | 1,000,000 | 2 dok | 1,000,000 | 2 dok | 1,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.01.0001 |  | a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dok |  |  |  |  |  | 10,026,800 | 2 dok | 5,000,000 | 2 dok | 5,500,000 | 2 dok | 5,500,000 | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.01.0002 |  | b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 2 dok |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 2 dok | 2,000,000 | 2 dok | 2,000,000 | 10 dok | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.01.0003 |  | c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.01.0004 |  | d | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD | 1 dok |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | 5 dok | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.01.0005 |  | e | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD | 1 dok |  |  |  |  |  | - | 1 dok | 1,000,000 | 1 dok | 1,000,000 | 5 dok | 1,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.01.0006 |  | f | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 dok |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 2 dok | 2,000,000 | 2 dok | 2,000,000 | 10 dok | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.02. | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | persentase dokumen / laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100 |  |  |  |  |  | 2,691,787,600 | 100 | 2,740,623,131 | 100 | 2,777,214,751 | 100 | 2,777,214,751 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.02.0001 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN | 30 orang/ bulan |  |  |  |  |  | 2,596,795,200 | 30 orang/ bulan | 2,542,560,533 | 30 orang/ bulan | 2,575,164,777 | 30 orang/ bulan | 2,575,164,777 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.02.0002 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen |  |  |  |  |  | 77,054,200 | .. Dok | 55,562,926 | .. Dok | 57,529,900 | .. Dok | 57,529,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.02.0002 |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen |  |  |  |  |  | - | .. Dok | 136,499,672 | .. Dok | 138,520,074 | .. Dok | 138,520,074 | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.02.0003 |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.02.0004 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.02.0005 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 1 Lapor an | 3,000,000 | 1 Lapor an | 3,000,000 | 5 Lapor an | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.02.0005 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 14,938,200 | 1 Lapor an | - | 1 Lapor an | - | 5 Lapor an | - | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.02.0006 |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.02.0007 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 2 Laporan |  |  |  |  |  | - | 2 Laporan | 3,000,000 | 2 Laporan | 3,000,000 | 10 Lapor an | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.02.0008 |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03 | C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase dokumen/ Laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 |  |  |  |  |  | - | 100 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.03.0001 |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03.0002 |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03.0003 |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03.0004 |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03.0005 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 1 Lap | 3,000,000 | 1 Lap | 3,000,000 | 5 Lap | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.03.0006 |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.03.0007 |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05. | D | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik | 100 |  |  |  |  |  | 9,455,600 | 100 | 53,150,798 | 100 | 60,999,900 | 100 | 60,999,900 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.05.0001 |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0002 |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 16 paket | 8,000,000 | 0 | 0 | 32 Paket | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.05.0003 |  |  | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 4,455,600 | 1 Dok | 2,000,000 | 1 Dok | 3,000,000 | 5 Dok | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.05.0004 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen |  |  |  |  |  | - | 2 Dok | 2,000,000 | 2 Dok | 4,000,000 | 10 Dok | 4,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.05.0005 |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0006 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0007 |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0008 |  |  | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0009 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang |  |  |  |  |  | - | 3 orang | 15,000,000 | 3 orang | 20,000,000 | 12 orang | 20,000,000 | Prov. Sul Sel | Prov. Sul Sel |
| x.xx.01.2.05.0010 |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.05.0011 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 orang |  |  |  |  |  | - | 2 orang | 10,000,000 | 3 orang | 15,000,000 | 13 orang | 15,000,000 | Prov. Sul Sel | Prov. Sul Sel |
| x.xx.01.2.05.0011 |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 orang |  |  |  |  |  | 5,000,000 | 3 orang | 16,150,798 | 3 orang | 18,999,900 | 15 orang | 18,999,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06. | E | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan administrasi umum kantor | 100 |  |  |  |  |  | 391,824,800 | 100 | 252,233,030 | 100 | 262,706,700 | 100 | 262,706,700 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.06.0001 |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket |  |  |  |  |  | - |  | 960,140 | 1 Paket | 989,900 | 5 Paket | 989,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0002 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 16 Paket |  |  |  |  |  | 18,825,000 | 8 Unit | 80,350,950 | 10 Paket | 84,989,984 | 50 Paket | 84,989,984 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0002 |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 Paket |  |  |  |  |  | 167,427,300 | 14 Unit | 14,000,000 | 5 Paket | 15,000,000 | 21 Paket | 15,000,000 | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.06.0003 |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.06.0004 |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.06.0005 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket |  |  |  |  |  | 3,220,000 | 2 Paket | 3,000,000 | 2 Paket | 3,000,000 | 10 Paket | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.06.0005 |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket |  |  |  |  |  | 9,572,500 | 2 Paket | 11,150,990 | 2 Paket | 13,989,900 | 10 Paket | 13,989,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0006 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 2 Dokumen |  |  |  |  |  | - | 2 dok | 5,000,000 | 2 dok | 5,000,000 | 10 dok | 5,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.06.0006 |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 2 Dokumen |  |  |  |  |  | 1,800,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0007 |  |  | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket bahan/material yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.06.0008 |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan |  |  |  |  |  | 4,800,000 | 2 Lap | 4,800,000 | 2 Lap | 4,800,000 | 10 Lap | 4,800,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.06.0009 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 312 Laporan |  |  |  |  |  | 75,780,000 | 322 Lapor an | 60,000,000 | 322 Lapor an | 60,000,000 | 1610 Lapor an | 60,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.06.0009 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 100 Laporan |  |  |  |  |  | 71,700,000 | 310 Lap | 72,970,950 | 320 Lap | 74,936,916 | 1550 Lap | 74,936,916 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0009 |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi |  |  |  |  |  |  | 38,700,000 | 305 Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kel BTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.06.0010 |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.06.0011 |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.07. | F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | persentase Ketersediaan BMD | 100 |  |  |  |  |  | - | 100 | 95,000,000 | 100 | 80,000,000 | 100 | 80,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.07.0001 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 |  |  |  |  |  | - |  | 35,000,000 | 0 | 0 | 4 unit | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.07.0002 |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.07.0005 |  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.07.0006 |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 |  |  |  |  |  | - |  | 60,000,000 | 10 unit | 65,000,000 | 40 unit | 65,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.07.0007 |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit asset tetap lainnya yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.07.0009 |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.07.0010 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 |  |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 2 Unit | 5,000,000 | 4 Unit | 5,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.07.0011 |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.08. | G | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 |  |  |  |  |  | 1,125,128,960 | 100 | 1,113,558,220 | 100 | 1,155,288,800 | 100 | 1,155,288,800 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.08.0001 |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.08.0002 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan |  |  |  |  |  | 24,985,000 | 12 Lap | 12,789,000 | 12 Lap | 12,789,000 | 12 Lap | 12,789,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.08.0002 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan |  |  |  |  |  | 13,733,490 | 12 Lap | 18,799,000 | 12 Lap | 22,999,900 | 12 Lap | 22,999,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.08.0002 |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan |  |  |  |  |  | 24,470,470 | 12 Lap | 13,000,000 | 12 Lap | 13,500,000 | 12 Lap | 13,500,000 | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.08.0003 |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.08.0004 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |  |  |  |  |  | 105,000,000 | 12 Lap | 270,000,000 | 12 Lap | 305,000,000 | 12 Lap | 305,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.08.0004 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |  |  |  |  |  | 383,400,000 | 12 Lap | 798,970,220 | 12 Lap | 800,999,900 | 12 Lap | 800,999,900 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.08.0004 |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  | 573,540,000 | 12 Lap | - | 0 | - | 0 | - | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.09. | H | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase BMD dalam kondisi baik | 100 |  |  |  |  |  | 390,323,800 | 100 | 139,500,700 | 100 | 162,579,900 | 100 | 162,579,900 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.09.0005 |  |  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.09.0006 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 unit |  |  |  |  |  | 5,680,000 | 3 unit | 3,000,000 | 3 unit | 3,000,000 | 3 unit | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.09.0006 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara |  |  |  |  |  |  | 2,920,000 | umit |  |  |  |  |  | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.09.0006 |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara |  |  |  |  |  |  | 9,210,000 | umit |  |  |  |  |  | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.09.0007 |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset tetap Lainnya yang Dipelihara | 3 unit |  |  |  |  |  | 3,050,000 | 6 unit | 3,600,000 | 6 unit | 3,600,000 | 6 unit | 3,600,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.09.0008 |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.09.0009 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit |  |  |  |  |  | 4,919,400 | 1 unit | 8,000,000 | 1 unit | 15,000,000 | 1 unit | 15,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.09.0010 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit |  |  |  |  |  | 123,120,000 | 1 unit | 29,950,350 | 1 unit | 32,989,950 | 1 unit | 32,989,950 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.09.0010 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |  |  |  |  |  |  | 118,794,400 | 1 unit | - | - | - | - | - | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.09.0010 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.09.0011 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.09.0012 |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x.xx.01.2.09.0013 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 7 unit |  |  |  |  |  | 59,110,000 | 7 unit | 65,000,000 | 7 unit | 75,000,000 | 7 unit | 75,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.09.0013 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 8 unit |  |  |  |  |  | 14,560,000 | 8 unit | 29,950,350 | 8 unit | 32,989,950 | 8 unit | 32,989,950 | Kel PTB | Kel PTB |
| x.xx.01.2.09.0013 |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangam dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan |  |  |  |  |  |  | 48,960,000 | 8 unit | - | - | - | - | - | Kel BTB | Kel BTB |
| x.xx.01.2.10. | I | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan di Kecamatan | 100 |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| x.xx.01.2.10.01 |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7:00 | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7:01 | KECAMATAN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (S1) |  |  | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 66.65% |  |  |  |  |  |  | 80.00% |  | 85.00% |  | 85.00% |  |  |  |
| 2 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1) | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1) | 7:01:02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan | 30 menit |  |  |  |  |  | 40,334,500 | 10 menit | 50,252,128 | 8 menit | 51,451,144 | 8 menit | 51,451,144 | Kecamatan Bontoharu | Kecamatan Bontoharu |
| 7.01.02.2.01 | A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | % Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan | 100 |  |  |  |  |  | 32,834,500 | 100 | 43,272,205 | 100 | 44,280,820 | 100 | 44,280,820 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.01.0001 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 32,834,500 | 1 Laporan | 20,992,409 | 1 Laporan | 21,493,288 | 4 Laporan | 21,493,288 | Kel PTB | Kel PTB |
| 7.01.02.2.01.0001 |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 0 Laporan | 21,279,796 | 1 Laporan | 21,787,532 | 5 Laporan | 21,787,532 | Kel BTB | Kel BTB |
| 7.01.02.2.01.0002 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | - | 1 Dok | 1,000,000 | 1 Dok | 1,000,000 | 1 Dok | 1,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.02. | B | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | % Urusan pemerintahan yang diselenggaran | 100 |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 100 | 2,979,923 | 100 | 3,170,324 | 100 | 3,170,324 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.02.0001 |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.02.0002 |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 0 Lap | 1,979,923 | 1 Lap | 2,000,000 | 1 Lap | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.02.0003 |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyrakat di Wilayah Kecamatan ( Laporan Informasi Kependudukan) | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 1 Lap | 1,000,000 | 1 Lap | 1,170,324 | 5 Lap | 1,170,324 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.03. | C | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | % Sarana &Prasaranan Umum yang dipelihara | 100 |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.03.0001 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.03.0002 |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasaranan dan  Fasilitas Pelayananan Umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04. | D | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | %Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan | 100 |  |  |  |  |  | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | 100 | 4,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.02.2.04.0001 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.0002 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.02.2.04.0003 |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 4,000,000 | 1 Laporan | 4,000,000 | 1 Laporan | 4,000,000 | 5 Laporan | 4,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan Kapasitas dan fasilitas perdesaan |  |  |  |  |  | Indeks Desa membangun | 0,6061 (berkem bang) |  |  |  |  |  |  | 0,7150 (maju) |  | 0,7300 (maju) |  | 0,7300 (maju) |  |  |  |
|  |  | Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat Desa |  |  |  |  | Persentase meningkatnya fungsi lembaga Desa yang dikoordinasikan | 60% |  |  |  |  |  |  | 71% |  | 73% |  | 73% |  | Kel BTB | Kel BTB |
| 3 | Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (T-5) | Meningkatkan kafasitas dan Fasilitas perdesaan (S-2) | 7:01:03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%) | 100 |  |  |  |  |  | 1,804,696,840 | 100 | ######## | 100 | 1,961,862,105 | 100 | 1,961,862,105 | Kec.Bth | Kec.Bth |
|  | 7.01.03.2.01. | A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | % Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 |  |  |  |  |  | 99,200,000 | 100 | 58,596,197 | 100 | 62,283,563 | 100 | 62,283,563 | Kec.Bth | Kec.Bth |
|  | 7.01.03.2.01.0002 |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Pembinaan Kampung KB dan Penaganan Gizi buruk) | 2 Dokumen |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 2 Dokumen | 9,695,729 | 2 Dokumen | 9,868,479 | 10 Dokumen | 9,868,479 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.03.2.01.0003 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 20,000,000 | 1 Lap | 13,500,000 | 1 Lap | 14,000,000 | 5 Lap | 14,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.03.2.01.0003 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 5,700,000 | 1 Lap | 35,400,468 | 1 Lap | 38,415,084 | 5 Lap | 38,415,084 | Kel PTB | Kel PTB |
|  | 7.01.03.2.01.0003 |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 70,000,000 | 1 Lap | 35,400,468 | 1 Lap | 38,415,084 | 5 Lap | 38,415,084 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.02. | B | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | % Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100 |  |  |  |  |  | 1,705,496,840 | 100 | 1,817,106,737 | 100 | 1,853,138,542 | 100 | 1,853,138,542 | Kec.Bth | Kec.Bth |
|  | 7.01.03.2.02.0001 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga kemasyarakatan |  |  |  |  |  | 15,330,000 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 17,448,637 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 20,325,477 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 20,325,477 | Kel PTB | Kel PTB |
|  | 7.01.03.2.02.0001 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga kemasyarakatan |  |  |  |  |  | 11,799,900 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 19,000,000 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 20,000,000 | 5 Lembaga kemasyarakatan | 20,000,000 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.02.0002 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun | 11 Unit |  |  |  |  |  | 783,440,260 | 10 Unit | 429,321,158 | 10 Unit | 432,540,496 | 10 Unit | 432,540,496 | Kel PTB | Kel PTB |
|  | 7.01.03.2.02.0002 |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun | 10 unit |  |  |  |  |  | 594,974,330 | 10 unit | 1,006,245,662 | 10 unit | 1,016,301,763 | 10 unit | 1,016,301,763 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.02.0003 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | .2 Pokmas/ ormas |  |  |  |  |  | 81,751,250 | .2 Pokmas/ ormas | 127,140,643 | .2 Pokmas/ ormas | 130,435,286 | .10 Pokmas/ ormas | 130,435,286 | Kel PTB | Kel PTB |
|  | 7.01.03.2.02.0003 |  |  | Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ( pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM ) | 2 Pokmas/ ormas |  |  |  |  |  | 218,201,100 | 2 Pokmas/ ormas | 190,000,000 | 2 Pokmas/ ormas | 200,000,000 | 10 Pokmas/ ormas | 200,000,000 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.02.0004 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan hasil evaluasi kelurahan | 2 Laporan |  |  |  |  |  | - | 0 Laporan | 18,950,637 | 2 Laporan | 21,535,520 | 10 Laporan | 21,535,520 | Kel PTB | Kel PTB |
|  | 7.01.03.2.02.0004 |  |  | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan hasil evaluasi kelurahan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 0 Laporan | 9,000,000 | 1 Laporan | 12,000,000 | 5 Laporan | 12,000,000 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.03. | C | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | % Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan | 100% |  |  |  |  |  | - | 100 | 40,440,000 | 100 | 46,440,000 |  | 46,440,000 | Kec.Bth | Kec.Bth |
|  | 7.01.03.2.03.0001 |  |  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan (Aparatur yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan) | 1 Lembaga kemasyarakatan |  |  |  |  |  | - | 1 Lembaga | 20,440,000 | 1 Lembaga | 25,440,000 | 1 Lembaga | 25,440,000 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.03.0003 |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatn | Jumlah Sarana dan Prasaranan Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Kegiatan Kelurahan Sehat) | 3 Unit |  |  |  |  |  | - | 3 Unit | 15,000,000 | 3 Unit | 16,000,000 | 15 Unit | 16,000,000 | Kel BTB | Kel BTB |
|  | 7.01.03.2.03.0004 |  |  | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 2 Laporan |  |  |  |  |  | - | 2 Laporan | 5,000,000 | 2 Laporan | 5,000,000 | 10 Laporan | 5,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.03.2.05. | D | Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) | | % Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan | 100% |  |  |  |  |  | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.03.2.05.0001 |  |  | Pencegahan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.03.2.05.0003 |  |  | Pembinaan penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan upaya pelestarian nilai - nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial |  |  |  | | | Indeks Ketahanan Sosial | 0.6817 |  |  |  |  |  |  | 0.7150 |  | 0.7150 |  | 0.7150 |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat |  |  | | | Tingkat Solidaritas sosial di Kecamatan | 68% |  |  |  |  |  |  | 71.5% |  | 71.5% |  | 71.5% |  |  |  |
|  |  |  | 7:01:04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%) | N/A |  |  |  |  |  | 36,205,600 | 1.00 | ######## | 1.00 | 494,808,635 | 1.00 | 494,808,635 | Kecamatan Bontoharu | Kecamatan Bontoharu |
| 4 | Meningkatnya Kapasitas Kelenbagaan keagamaan (T-10) | Meningkatnya fasilitasi pelayanan keagamaan (S-10) | 7.01.04.2.01. | A | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | % Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | N/A |  |  |  |  |  | 27,355,600 | 1.00 | 472,812,468 | 1.00 | 484,473,355 | 1.00 | 484,473,355 |  |  |
| 7.01.04.2.01.0001 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 1 Laporan | 21,279,796 | 1 Laporan | 21,787,532 | 5 Laporan | 21,787,532 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.04.2.01.0001 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 14,400,000 | 1 Laporan | 11,000,000 | 1 Laporan | 11,452,251 | 5 Laporan | 11,452,251 | Kel PTB | Kel PTB |
| 7.01.04.2.01.0001 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 9,455,600 | 1 Laporan | 11,000,000 | 1 Laporan | 11,452,251 | 5 Laporan | 11,452,251 | Kel PTB | Kel PTB |
| 7.01.04.2.01.0002 |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumalh Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 1 Laporan | 429,532,672 | 1 Laporan | 439,781,321 | 5 Laporan | 439,781,321 | Kel BTB | Kel BTB |
| 7.01.04.2.02. | B | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | % penerpan dan penegakan perda dan perkada | 100% |  |  |  |  |  | 8,850,000 | 100% | 10,279,796 | 100% | 10,335,280 | 100% | 10,335,280 |  |  |
| 7.01.04.2.02.0001 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia (Penertiban ternak liar terlaksana sesuai perda dan berkurangnya persentase kasus illegal logging) | 2 Laporan |  |  |  |  |  | 8,850,000 | 2 Laporan | 10,279,796 | 2 Laporan | 10,335,280 | 10 Laporan | 10,335,280 | Kel PTB | Kel PTB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan keagamaam |  |  |  |  |  | Indeks kesalehan sosial | n/a |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan |  |  |  |  | Tingkat toleransi di Kecamatan | 60% |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 75% |  | 75% |  |  |  |
|  |  |  | 7:01:05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat Kecamatan (%) | 0.00 |  |  |  |  |  | 65,005,000 | 0.00 | 74,479,284 | 0.00 | 76,256,360 | 0.00 | 76,256,360 | Kecamatan Bontoharu | Kecamatan Bontoharu |
| 5 | Meningkatkan aktualisasi nilai budaya (T-5) | Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9) | 7.01.05.2.01. | A | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | 2 Keg |  |  |  |  |  | 65,005,000 | 2 Keg | 74,479,284 | 2 Keg | 76,256,360 | 2 Keg | 76,256,360 |  |  |
| 7.01.05.2.01.0001 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang |  |  |  |  |  | 28,000,000 | 250 Orang | 26,199,489 | 300 Orang | 27,468,829 | 300 Orang | 27,468,829 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.05.2.01.0001 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang |  |  |  |  |  | 12,321,600 | 50 Orang | 5,445,123 | 50 Orang | 5,653,566 | 50 Orang | 5,653,566 | Kel PTB | Kel PTB |
| 7.01.05.2.01.0002 |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | . Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.0003 |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | . Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.0004 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang |  |  |  |  |  | 15,000,000 | 200 Orang | 27,000,000 | 200 Orang | 27,000,000 | 200 Orang | 27,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.05.2.01.0004 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 50 Orang |  |  |  |  |  | 9,683,400 | 50 Orang | 5,194,775 | 50 Orang | 5,240,200 | 50 Orang | 5,240,200 | Kel PTB | Kel PTB |
| 7.01.05.2.01.0004 |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 50 Orang |  |  |  |  |  | 0 | 50 Orang | 10,639,897 | 50 Orang | 10,893,765 | 50 Orang | 10,893,765 | Kel BTB | Kel BTB |
| 7.01.05.2.01.0005 |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.0006 |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.0007 |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01.05.2.01.0008 |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan |  |  |  |  |  | Indeks desa membangun | 0,6061 (berkem bang) |  |  |  |  |  |  | 0,7150 (Maju) |  | 0,7300 (Maju) |  | 0,7300 (Maju) |  |  |  |
|  |  | Meningkatkan kualitas pemerintahan desa |  |  |  |  | Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 7:01:06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%) | 40 |  |  |  |  |  | 149,673,900 | 65 | 154,916,911 | 70 | 158,613,229 | 70 | 158,613,229 | Kecamatan Bontoharu | Kecamatan Bontoharu |
| 6 | Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan (T-2) | Meningkatkan kafasitas dan Fasilitas perdesaan (S-2) | 7.01.06.2.01 | A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | % pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan | 40 |  |  |  |  |  | 149,673,900 | 65 | 154,916,911 | 70 | 158,613,229 | 70 | 158,613,229 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0001 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.0002 |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa(Lomba desa/kel) | ... Dokumen |  |  |  |  |  | - | 1 dok | 16,415,294 | 1 dok | 16,666,983 | 5 dok | 16,666,983 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0003 |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | ... Dokumen |  |  |  |  |  | - | 1 dok | 2,000,000 | 1 dok | 2,500,000 | 5 dok | 2,500,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | 7.01.06.2.01.0004 |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan fasilitasi dalam rangka   Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 1 Laporan | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 5 Laporan | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | 7.01.06.2.01.0005 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.0006 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | .. Dokumen |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0007 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dok | 0 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.06.2.01.0008 |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah dokumen rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.01.06.2.01.0009 |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa (Fasilitasi dan Monitoring PBB) | 1 dokumen |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 1 dok | 3,000,000 | 1 dok | 3,000,000 | 5 dok | 3,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  | 7.01.06.2.01.0010 |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | 1 dokumen |  |  |  |  |  | 0 | 1 dok | 3,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | 2 dok | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | 7.01.06.2.01.0011 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 3,500,000 | 1 dok | 4,000,000 | 1 dok | 4,000,000 | 5 dok | 4,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0011 |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 dok |  |  |  |  |  | 35,964,500 | 1 dok | 10,214,302 | 1 dok | 10,458,016 | 5 dok | 10,458,016 | Kel BTB | Kel BTB |
| 7.01.06.2.01.0012 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 6,000,000 | 1 dok | 13,000,000 | 1 dok | 13,000,000 | 5 dok | 13,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0012 |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (PKK) dan LPM ) | 2 Dokumen |  |  |  |  |  | 53,490,000 | 2 dok | 39,127,500 | 2 dok | 40,450,230 | 2 dok | 40,450,230 | Kel PTB | Kel PTB |
|  |  | 7.01.06.2.01.0013 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif ((Musrenbang) | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 10,000,000 | 1 dok | 16,000,000 | 1 dok | 16,000,000 | 5 dok | 16,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
|  |  | 7.01.06.2.01.0014 |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.06.2.01.0015 |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 2,000,000 | 1 dok | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0016 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Asistensi dan Pembinaan APBDes) | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 6,000,000 | 1 dok | 9,000,000 | 1 dok | 9,000,000 | 10 dok | 9,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0017 |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 0 | 1 Lap | 2,000,000 | 1 Lap | 2,000,000 | 1 Lap | 2,000,000 |  |  |
| 7.01.06.2.01.0018 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan |  |  |  |  |  | - | 1 Lap | 2,000,000 | 1 Lap | 2,000,000 | 1 Lap | 2,000,000 | Kec. Bth | Kec. Bth |
| 7.01.06.2.01.0018 |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan |  |  |  |  |  | 27,719,400 | 2 Lap | 32,159,815 | 2 Lap | 32,538,000 | 10 Laporan | 32,538,000 | Kel PTB | Kel PTB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 6,723,463,400 | | 7,088,949,400 | | 7,258,281,524 | | 7,258,281,524 | |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Bontoharu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontoharu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontoharu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontoharu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

146

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2026 Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD** | |
| Tahun 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 menit | 25 menit | 20 menit | 15 menit | 10 menit | 8 menit | 8 menit | |
| 2 | Persentase Peningkatan Partisifasi masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100.00 | |
| 3 | Persentase Penurunan Jumlah kriminalitas di Kecamatan | N/A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 4 | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Persentase urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 40 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | | 70,00 | |

147

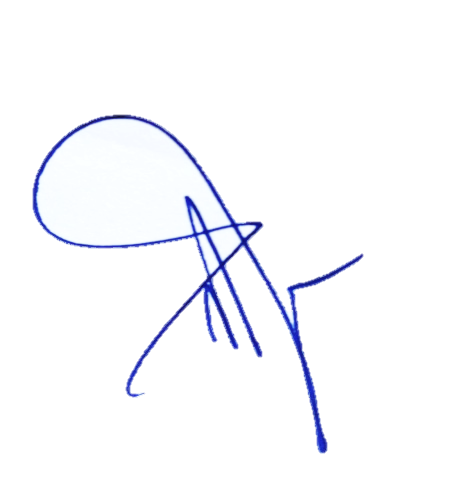
## BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontoharu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Bontoharu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Bontoharu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontoharu. Rencana strategis Kecamatan Bontoharu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaan Renstra Kecamatan Bontoharu Periode 2022 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2022 – 2026 adalah Camat Bontoharu yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2022 – 2026.

Demikian semoga rencana strategis Kecmatan Bontoharu Kabupaten Kepualauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontoharu.

Bontoharu, Agustus 2023

## Camat Bontoharu

**ANDI BATARA GAU, SE**

Nip. 197505292010011008